KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

TINJAUAN HASIL MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Bandung, 21 Agustus 2025

Aditya Nuriya Sholikhah
Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP)
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Maksud dan Tujuan

1) Mengukur kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. **Bukan mengukur kepatuhan kepada Komisi Informasi.**
2) Pengukuran kepatuhan Badan Publik berdasarkan **Hak-hak Badan Publik** menolak memberikan informasi yang dikecualikan dan atau tidak sesuai ketentuan perundang-undangan; serta **Kewajiban-kewajiban** Badan Publik yaitu menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi public, menyediakan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan, pertimbangan-pertimbangan secara tertulis, pengembangan system layanan informasi dan termasuk pengujian tentang konsekuensi informasi dikecualikan
3) Mengidentifikasi, menginventarisasi, memberikan umpan balik, dan solusi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik;
4) Menetapkan kategori kepatuhan Badan Publik.

TAHAPAN MONEV KIP 2025

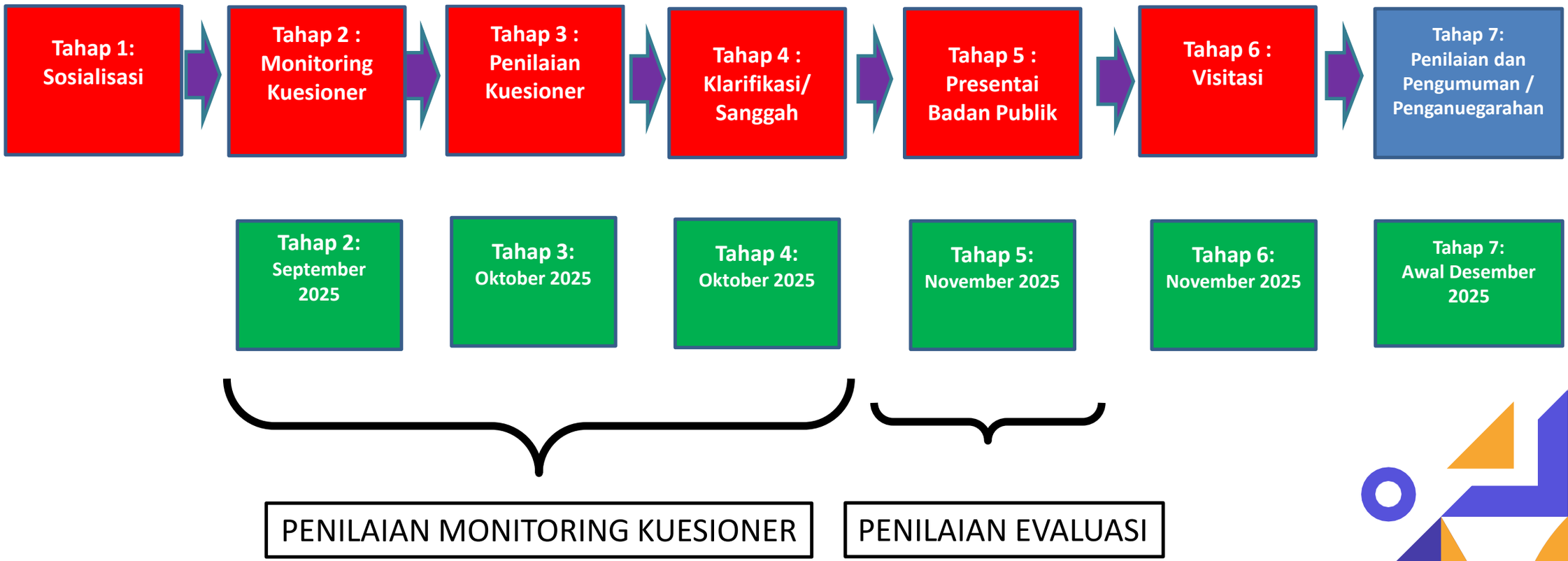

METODE PENILAIAN

1. **Parameter penilaian evaluasi meliputi aspek-aspek sebagai berikut:**
   1.1 Indikator Mengumumkan Informasi Publik, total nilai 25;.
   1.2 Indikator Menyediakan Dokumen Informasi Publik, total nilai 10;
   1.3 Indikator Pengembangan Website, total nilai 20;
   1.4 Indikator Kelembagaan, total nilai 15;
   1.5 Indikator Pengadaan Barang dan Jasa, total nilai 30;

2. **Pembobotan Penilaian Evaluasi Monev KIP 2025**
   2.1 Penilaian Kuesioner bobot nilai 80%. Penilaian kuesioner dilakukan dengan formula:

   NIlai Verifikasi x 80% = Nilai Passing Grade

   2.2 Nilai batas minimal (*passing grade*) penilaian kuesioner adalah **60 (enam puluh)** sebagai syarat Badan Publik disertakan dalam tahap penilaian selanjutnya.

METODE PENILAIAN

PENETAPAN KUALIFIKASI

Penetapan Kualifikasi Badan Publik hasil Monev KIP Tahun 2025 berdasarkan akumulasi penilaian dari tahapan Verifikasi dan Presentasi dengan formula:

[Nilai Verifikasi SAQ x 80%] + [Nilai Presentasi x 20%] = NILAI KUALIFIKASI

Nilai kualifikasi adalah skor yang diperoleh Badan Publik sebagai dasar penetapan kualifikasi keterbukaan informasi publik, yaitu:

a) Kualifikasi Informatif, dengan nilai 90 s/d 100;
b) Kualifikasi Menuju Informatif, dengan nilai 80 s/d 89,9;
c) Kualifikasi Cukup Informatif, dengan nilai 60 s/d 79,9;
d) Kualifikasi Kurang Informatif, dengan nilai 40 s/d 59,9;
e) Kualifikasi Tidak Informatif, dengan nilai kurang dari 39,9.

Penetapan Badan Publik Terbaik Dari Seluruh Kategori Badan Publik, meliputi :

a. Peringkat 10 – 15 besar gabungan dari seluruh kategori Badan Publik
b. Mendapat nilai maksimal dalam visitasi
c. Komisi Informasi akan menetapkan 1 – 5 Badan Publik Terbaik lintas Kategori.

TAHAPAN MONITORING KUESIONER

Monitoring Kuesioner melakukan penilaian terhadap :

1) Mengumumkan Informasi Publik. Badan Publik telah mengumumkan informasi publik wajib berkala di website.
2) Menyediakan Dokumen Informasi Publik. Badan Publik memiliki dan menguasai informasi publik dalam bentuk dokumen.
3) Pengembangan Website. Badan Publik melakukan inovasi-inovasi layanan informasi public.
4) Pengadaan Barang dan Jasa. Badan Publik telah mengumumkan, menyediakan informasi pengadaan barang dan jasa serta aktivitas unit pengelola pengadaan barang dan jasa
5) Kelembagaan. Badan Publik telah melakukan aktivitas-aktivitas kelembagaan dalam penguatan kapasitas PPID atau unit layanan informasi publik.

PENILAIAN KUESIONER : MENGUMUMKAN

1) Mengumumkan Informasi Publik.

a) Badan Publik diharuskan menyediakan (1) alamat website, (2) tangkapan layar, dan (3) dokumen yang sah/terkait.

b) Alamat website harus merujuk kepada tempat/posisi informasi public diumumkan, bukan kepada ruang penyimpanan

c) Informasi publik yang diumumkan diwebsite berupa informasi elektronik BUKAN dalam bentuk ringkasan power point, slide, potongan halaman dan sejenisnya

d) Dokumen sah/terkait adalah dokumen elektronik (pdf) yang tidak mengandung informasi dikecualikan. Bilamana ada informasi dikecualikan, BP dapat melakukan penghitaman.

e) TIDAK BOLEH ada pembatasan hak akses

f) Badan publik tidak diperkenankan menyediakan alamat dalam bentuk google drive/awan/cloud dan sejenisnya.

TATA CARA PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK (LENGKAP)

TERSEDIA AKSES DOKUMEN

CATATAN UNTUK BPS: LENGKAPI TAHUN TERBARU

CONTOH PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK TIDAK TEPAT
(yang diminta informasi di website, bukan bukti pdf)

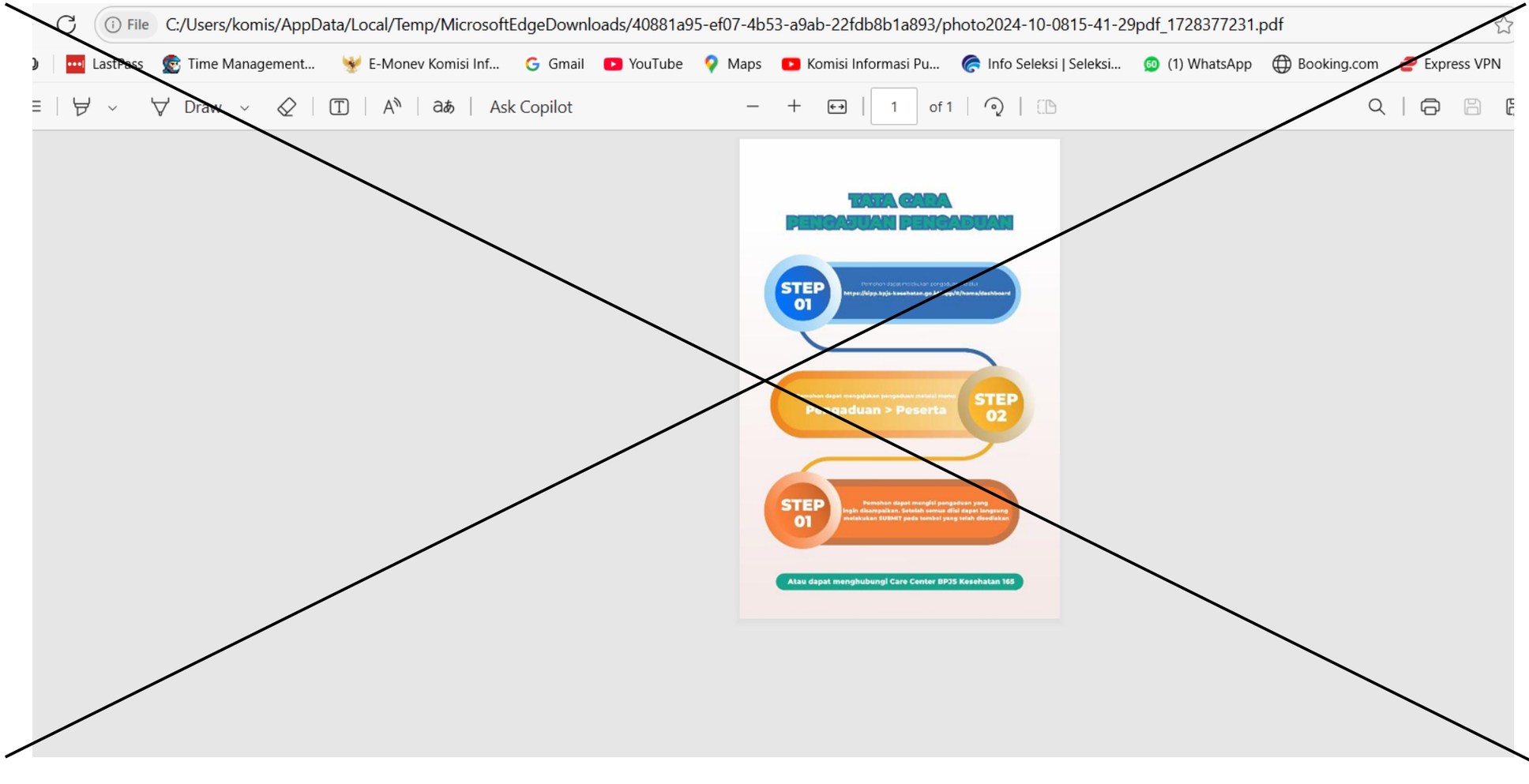

TATA CARA PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK: TIDAK GOOGLE DRIVE

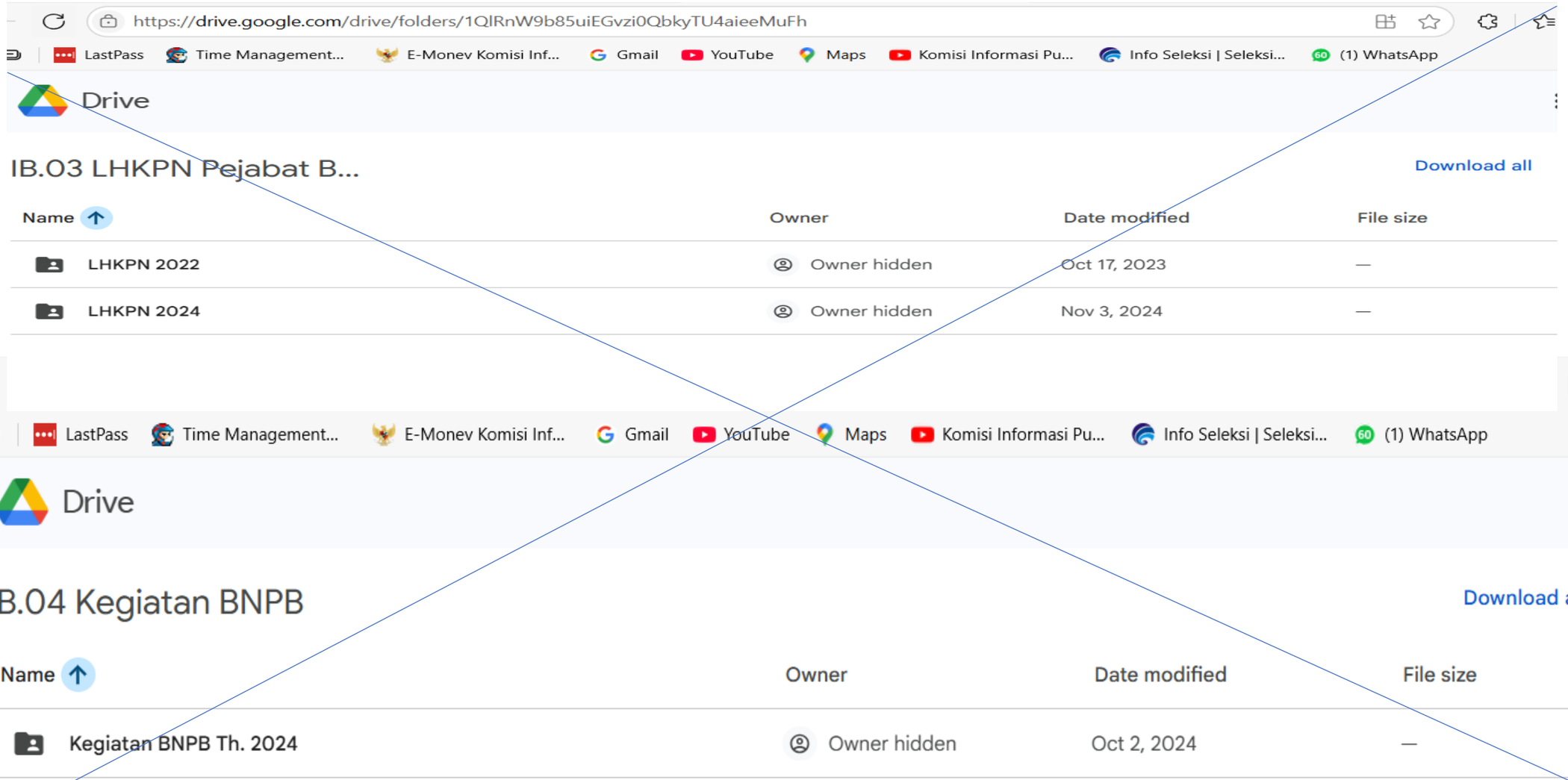

TIDAK BOLEH PEMBATASAN AKSES INFORMASI WAJIB BERKALA

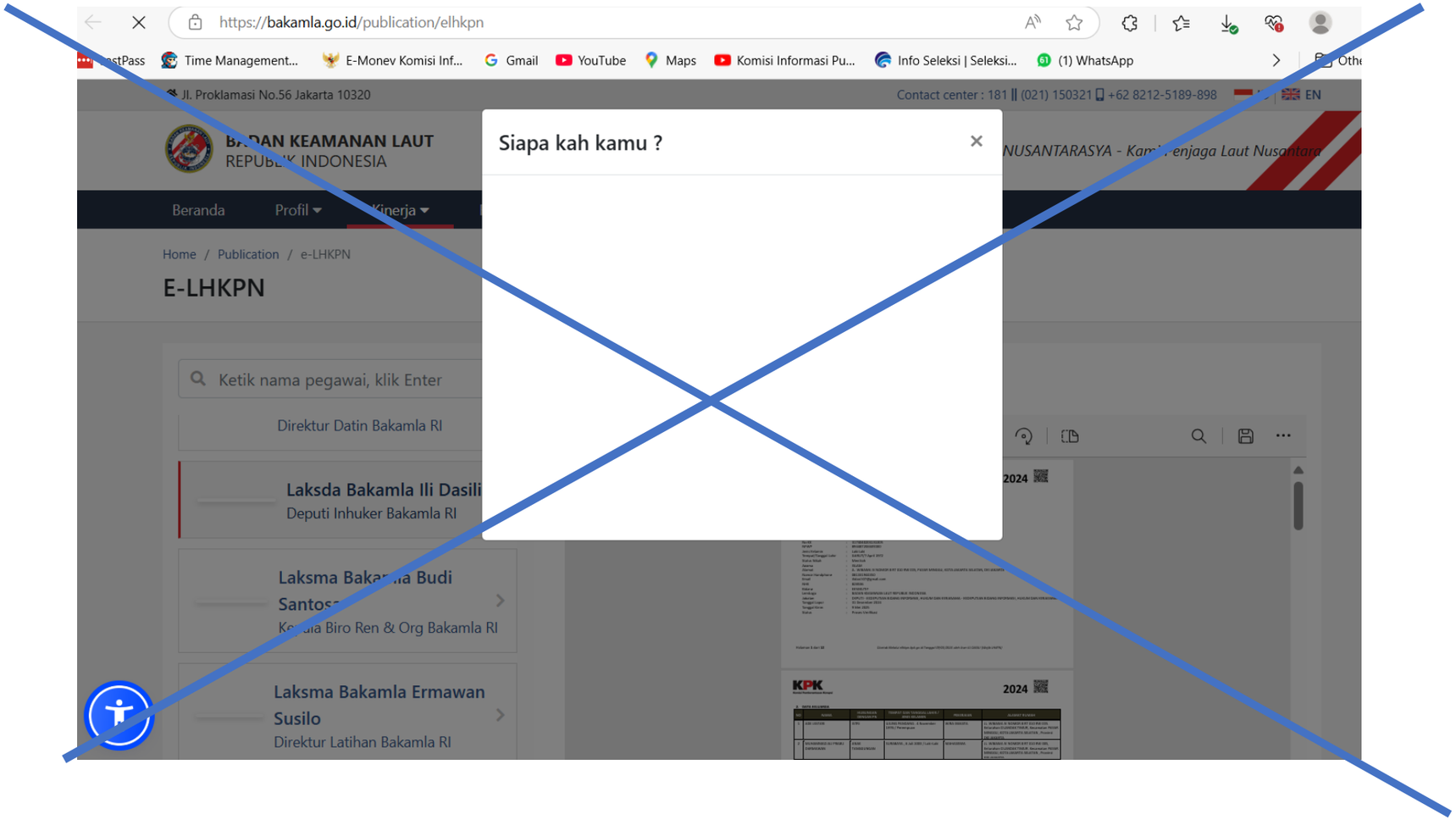

TATA CARA PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK

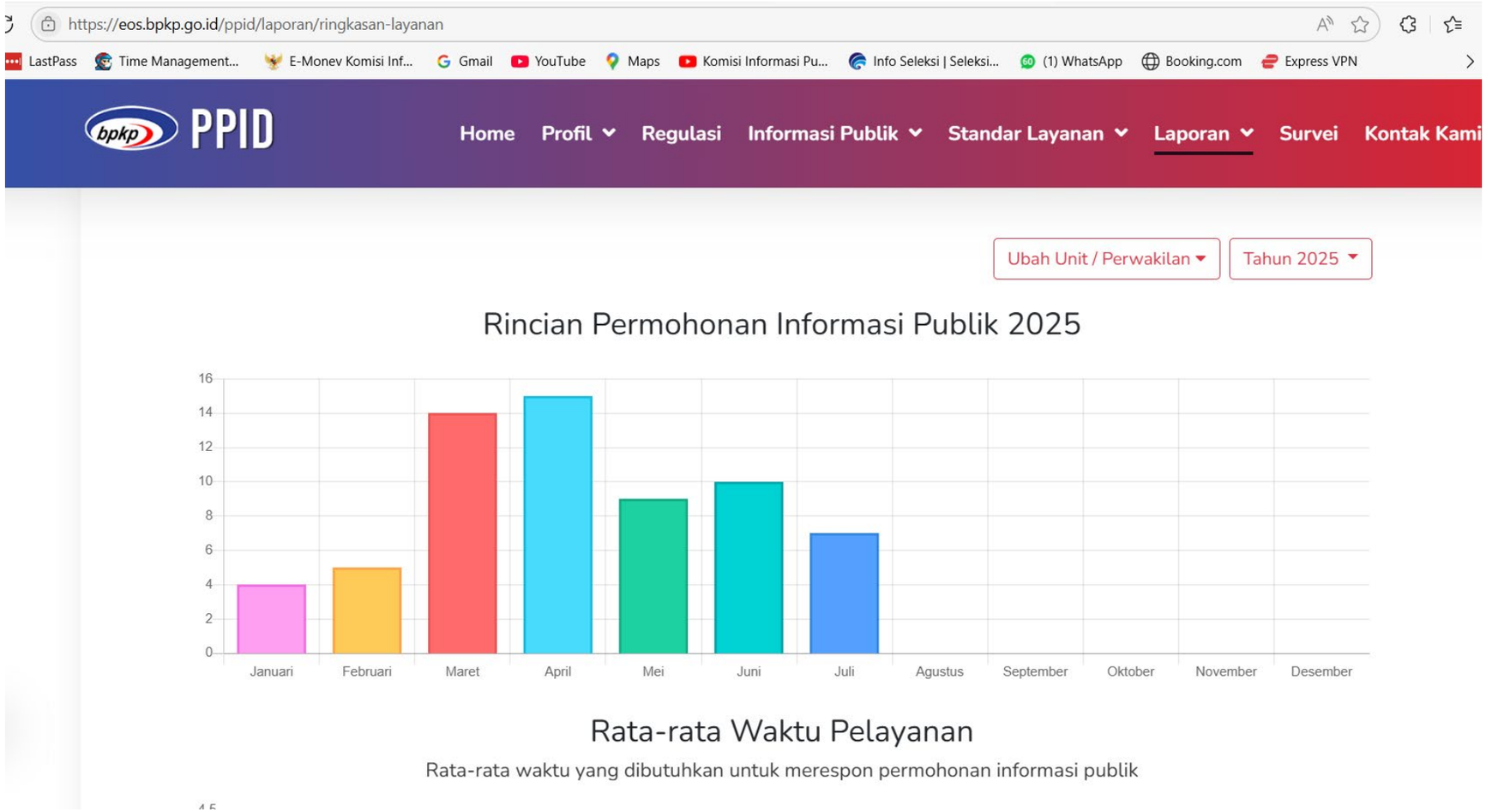

CONTOH INFORMASI ELEKTRONIK

SERTAKAN AKSES DOKUMEN

CONTOH PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK REALISASI ANGGARAN REAL TIME

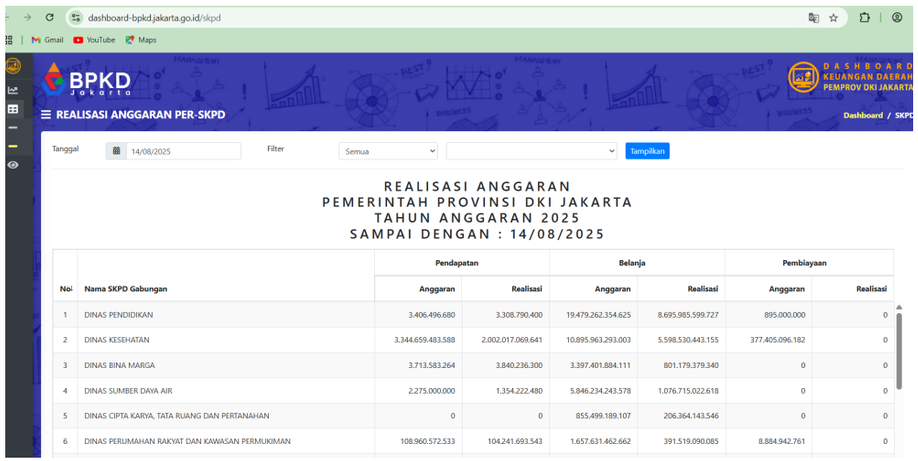

No	Nama SKPD Gabungan	Pendapatan		Belanja		Pembiayaan	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	DINAS PENDIDIKAN	3.406.496.680	3.308.790.400	19.479.262.354.625	8.695.985.599.727	895.000.000	0
2	DINAS KESEHATAN	3.344.659.483.588	2.002.017.069.641	10.895.963.293.003	5.598.530.443.155	377.405.096.182	0
3	DINAS BINA MARGA	3.713.583.264	3.840.236.300	3.397.401.884.111	801.179.379.340	0	0
4	DINAS SUMBER DAYA AIR	2.275.000.000	1.354.222.480	5.846.234.243.578	1.076.715.022.618	0	0
5	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN	0	0	855.499.189.107	206.364.143.546	0	0
6	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	108.960.572.533	104.241.693.543	1.657.631.462.662	391.519.090.085	8.884.942.761	0

No	Nama SKPD	Pendapatan		Belanja		Pembiayaan	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	DINAS PENDIDIKAN	0	0	11.539.139.356.414	5.461.879.886.307	0	0
2	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKPUS	0	0	145.045.968.964	64.788.575.057	0	0
3	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS	0	0	195.834.897.644	98.169.750.639	0	0
4	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKUT	0	0	166.948.501.946	77.539.714.301	0	0
5	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKUT	0	0	212.180.741.810	111.135.164.260	0	0
6	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR	0	0	274.492.880.662	138.596.218.891	0	0

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5. BELANJA				
5.1. BELANJA OPERASI				
5.1.01	Belanja Pegawai	8.811.876.579.758	4.201.651.636.534	47,68
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	693.152.523.898	266.780.949.067	38,49
5.1.05	Belanja Hibah	1.551.544.552.000	770.423.164.481	49,66
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**11.056.573.655.656**	**5.238.855.750.082**	**47,38**
5.2. BELANJA MODAL				

PENILAIAN KUESIONER : MENYEDIAKAN

2) Menyediakan Dokumen Informasi Publik.

a) Badan Publik diharuskan menyediakan (1) alamat website, (2) tangkapan layar, dan (3) dokumen yang sah/terkait.

b) Alamat website harus merujuk kepada tempat/posisi informasi public disediakan/disimpan/dikelola.

c) Dokumen sah/terkait adalah dokumen elektronik (pdf) yang tidak mengandung informasi dikecualikan. Bilamana ada informasi dikecualikan, BP dapat melakukan penghitaman.

d) Penguasaan Dokumen diperbolehkan dalam bentuk daftar yang tercantum dalam website

e) Badan Publik diperbolehkan menggunakan hak akses terbatas (penggunaan akun/password pemohon)

f) Badan public diperkenankan menyediakan alamat dalam bentuk google drive/awan/cloud dan sejenisnya.

CONTOH PENYAMPAIAN DOKUMEN (ISTIMEWA)

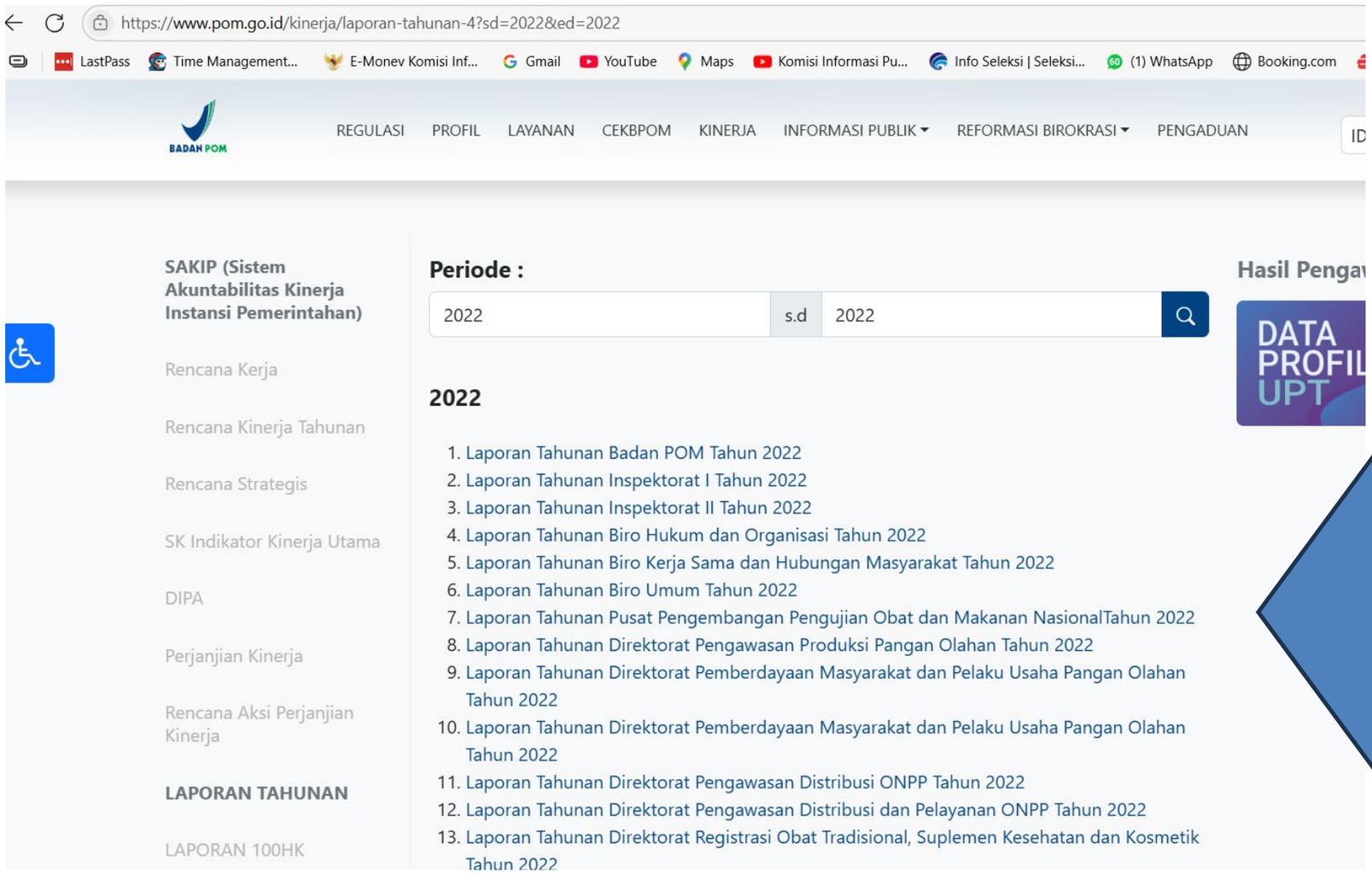

Monev
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

https://ppid.pom.go.id/informasi-publik/informasi?i=3&t=informasi_setiap_saat

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BERANDA | PROFIL | REGULASI | INFORMASI PUBLIK | LAPORAN | STANDAR LAYANAN | KALENDER KEGIATAN | BERITA | PORTAL PPID | FAQ

V. Perjanjian Kinerja

Show 10 entries

Search:

Judul	Tahun	Bagian	Terakhir Diubah	Akses Informasi
Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2025	2025	PUSAT	11-03-2025 00:00:00	Akses
Perjanjian Kinerja Unit Kerja Pusat Tahun 2025	2025	PUSAT	11-03-2025 00:00:00	Akses
Perjanjian Kinerja Unit Pelaksana Teknis Tahun 2025	2025	BALAI	11-03-2025 00:00:00	Akses
Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2024	2024	PUSAT	18-03-2024 00:00:00	Akses
Perjanjian Kinerja Unit Kerja Pusat Tahun 2024	2024	PUSAT	18-03-2024 00:00:00	Akses
Perjanjian Kinerja Unit Pelaksana Teknis Tahun 2024	2024	BALAI	18-03-2024 00:00:00	Akses
Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2023	2023	PUSAT	14-03-2023 00:00:00	Akses
Perjanjian Kinerja Unit Kerja Pusat Tahun 2023	2023	PUSAT	14-03-2023 00:00:00	Akses
Perjanjian Kinerja Unit Pelaksana Teknis Tahun 2023	2023	BALAI	14-03-2023 00:00:00	Akses
Perjanjian Kinerja Unit Pelaksana Teknis Tahun 2022	2022	PUSAT	30-03-2022 00:00:00	Akses

Showing 1 to 10 of 33 entries

Previous 1 2 3 4 Next

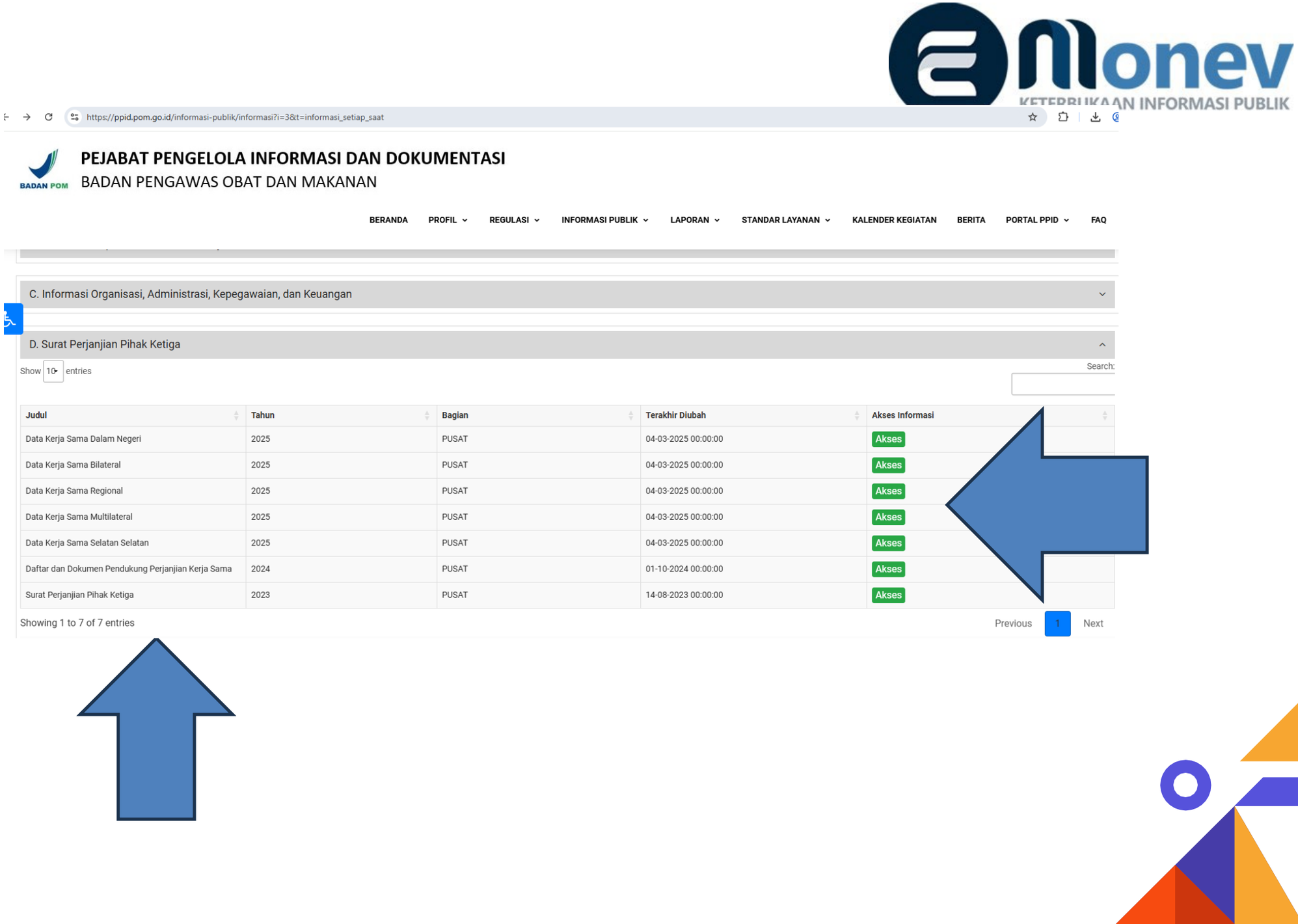

https://ppid.pom.go.id/informasi-publik/informasi?i=3&t=informasi_setiap_saat

BADAN POM

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BERANDA | PROFIL | REGULASI | INFORMASI PUBLIK | LAPORAN | STANDAR LAYANAN | KALENDER KEGIATAN | BERITA | PORTAL PPID | FAQ

C. Informasi Organisasi, Administrasi, Kepegawaian, dan Keuangan

D. Surat Perjanjian Pihak Ketiga

Show 10 entries

Search:

Judul	Tahun	Bagian	Terakhir Diubah	Akses Informasi
Data Kerja Sama Dalam Negeri	2025	PUSAT	04-03-2025 00:00:00	Akses
Data Kerja Sama Bilateral	2025	PUSAT	04-03-2025 00:00:00	Akses
Data Kerja Sama Regional	2025	PUSAT	04-03-2025 00:00:00	Akses
Data Kerja Sama Multilateral	2025	PUSAT	04-03-2025 00:00:00	Akses
Data Kerja Sama Selatan Selatan	2025	PUSAT	04-03-2025 00:00:00	Akses
Daftar dan Dokumen Pendukung Perjanjian Kerja Sama	2024	PUSAT	01-10-2024 00:00:00	Akses
Surat Perjanjian Pihak Ketiga	2023	PUSAT	14-08-2023 00:00:00	Akses

Showing 1 to 7 of 7 entries

Previous 1 Next

Monev
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

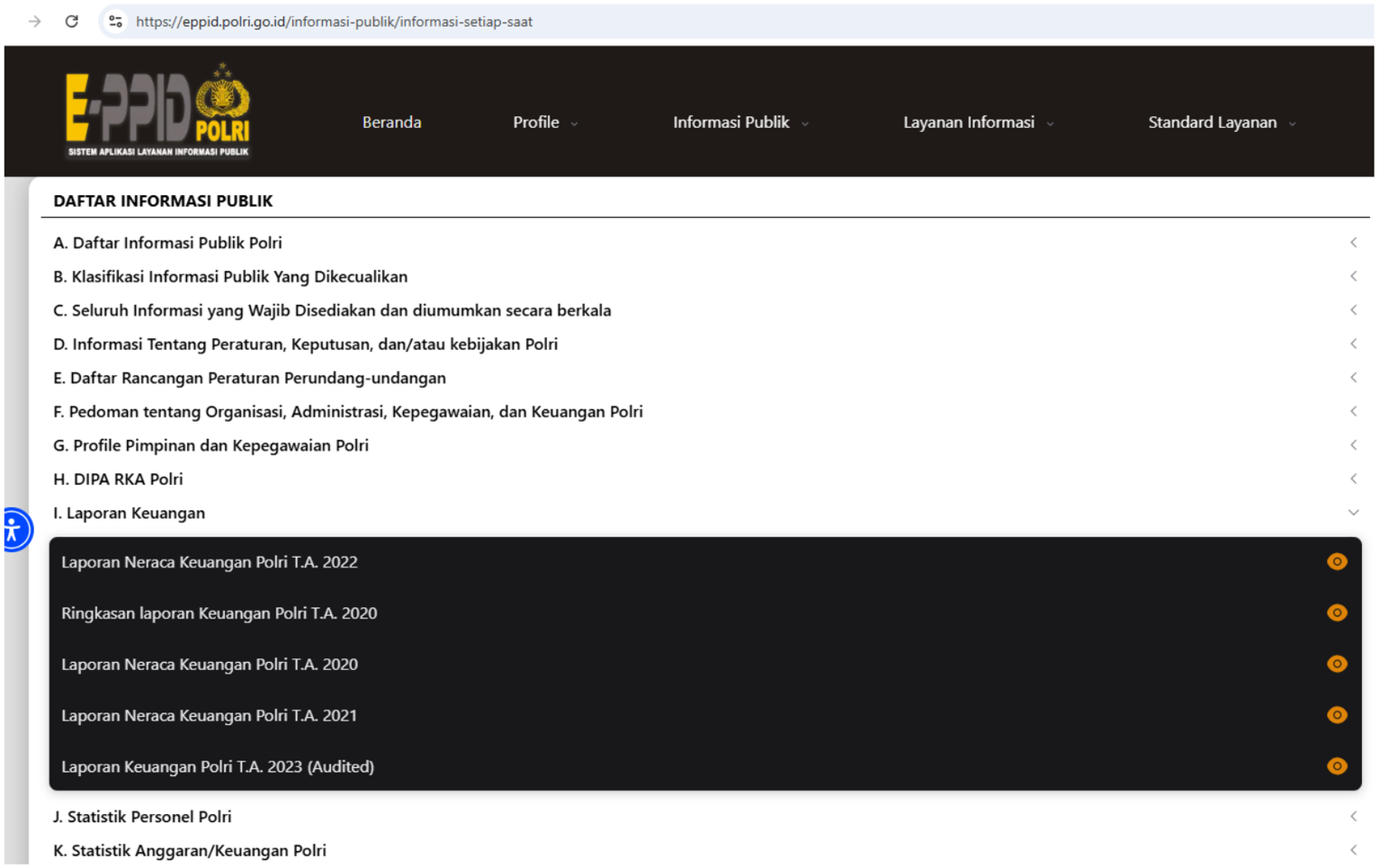

Monev
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

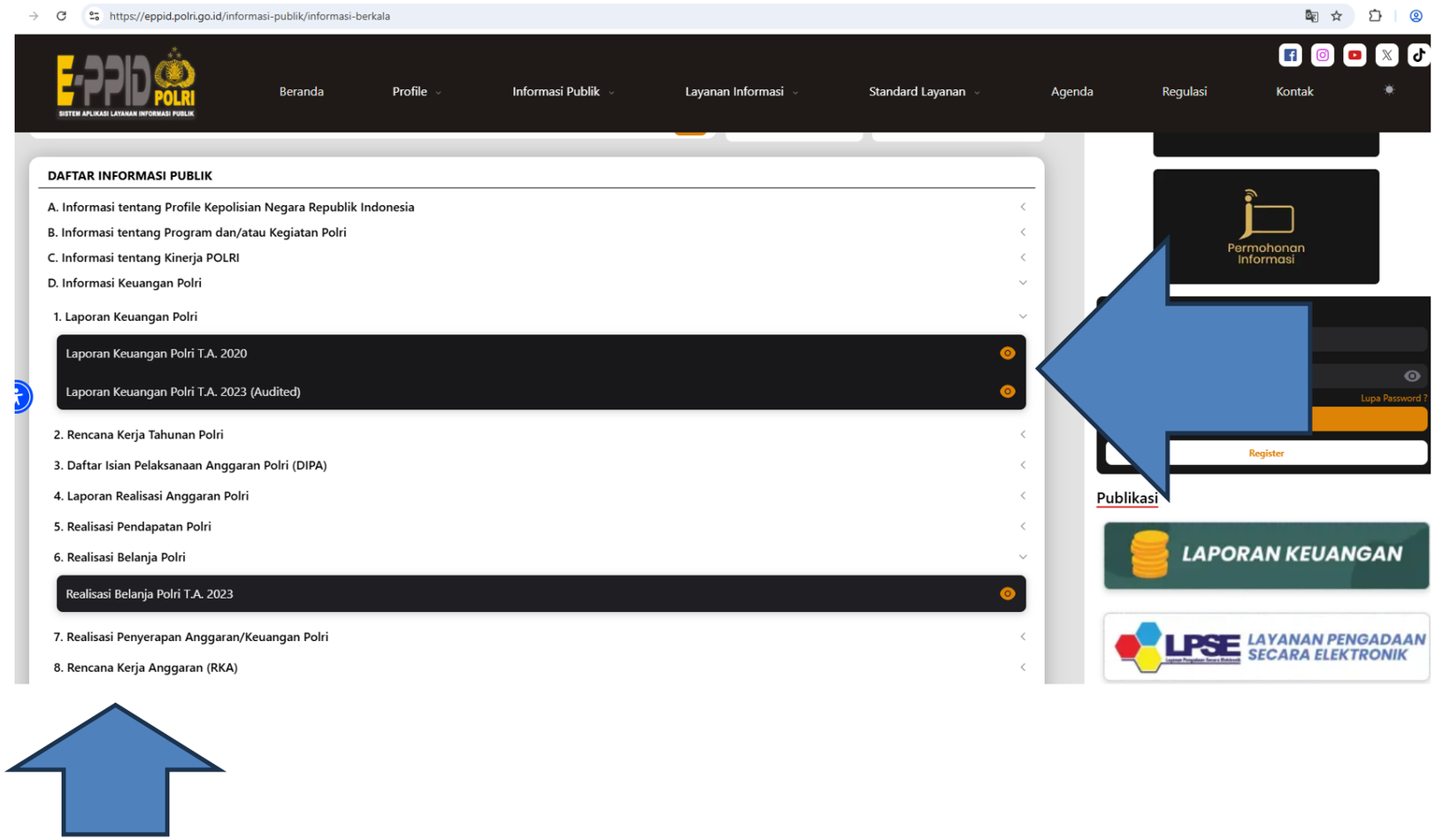

PENILAIAN KUESIONER : WEBSITE

3) Pengembangan Website

a) Badan Publik diharuskan menyediakan bukti-bukti pengembangan website dan atau inovasi-inovasi yang telah dilaksanakan

b) Badan Publik wajib mencantumkan seluruh Alamat website PPID Pelaksana.

c) Bilamana PPID Pelaksana tidak memiliki website atau website tersentralisasi, Badan Publik Alamat mencantumkan website induk dengan merujuk kepada layanan informasi PPID Pelaksana.

PENILAIAN KUESIONER : PENGADAAN BARANG DAN JASA

4) Pengadaan Barang dan Jasa.

(I) Mengumumkan Perencanaan Pengadaan

a) Badan Publik diharuskan menyediakan (1) alamat website, (2) tangkapan layar

b) Alamat website harus merujuk kepada tempat/posisi informasi public diumumkan, bukan kepada ruang penyimpanan

c) Pengadaan strategis adalah yang memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut: (1) berkaitan program nasional atau (2) merupakan nilai tertinggi dari seluruh paket atau (3) berkaitan tupoksi dan kewenangan

(II) Mengumumkan Tahap Pemilihan dan Pelaksanaan

a) Badan Publik diharuskan menyediakan (1) alamat website, (2) tangkapan layar, dan (3) dokumen yang sah/terkait.

b) Alamat website harus merujuk kepada tempat/posisi informasi public diumumkan, bukan kepada ruang penyimpanan

c) Bilamana jenis informasi atau dokumen tertentu tidak dipersyaratkan/tidak diperlukan, PPID menyampaikan informasinya di laman website dan TIDAK PERLU membuat pernyataan.

PENILAIAN KUESIONER : PENGADAAN BARANG DAN JASA

4) Pengadaan Barang dan Jasa.

(II) Mengumumkan Tahap Pemilihan dan Pelaksanaan

d) Informasi public yang diumumkan diwebsite berupa informasi elektronik BUKAN dalam bentuk ringkasan power point, slide, potongan halaman dan sejenisnya

e) Dokumen sah/terkait adalah dokumen elektronik (pdf) yang tidak mengandung informasi dikecualikan. Bilamana ada informasi dikecualikan, BP dapat melakukan penghitaman.

f) TIDAK BOLEH ada pembatasan hak akses

g) Badan public tidak diperkenankan menyediakan alamat dalam bentuk google drive/awan/cloud dan sejenisnya.

(III) Unit Pengadaan Barang dan Jasa

PENILAIAN KUESIONER : PENGADAAN BARANG DAN JASA

4) Pengadaan Barang dan Jasa.

(IV) Sistem E-Purchasing /E-Katalog

a) Badan Publik diharuskan menyediakan (1) alamat website, (2) tangkapan layar

b) Alamat website harus merujuk kepada tempat/posisi informasi public diumumkan, bukan kepada ruang penyimpanan

c) Badan Publik DAPAT menggantikan jenis-jenis dokumen dalam SAQ dengan dokumen-dokumen yang disediakan sesuai dengan system e-purchasing/e-katalog. Tidak menyertakan dokumen terkait berimplikasi kepada skor SAQ

d) Dokumen sah/terkait adalah dokumen elektronik (pdf) yang tidak mengandung informasi dikecualikan. Bilamana ada informasi dikecualikan, BP dapat melakukan penghitaman.

e) TIDAK BOLEH ada pembatasan hak akses

f) Badan public tidak diperkenankan menyediakan alamat dalam bentuk google drive/awan/cloud dan sejenisnya.

TATA CARA PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK

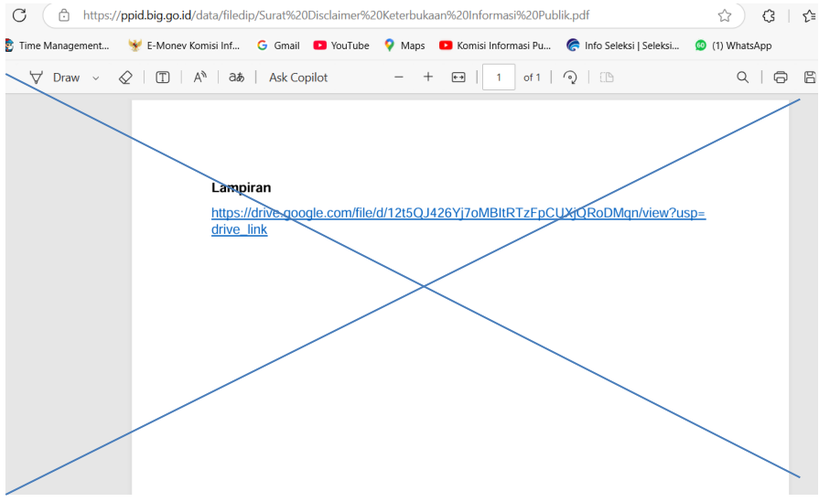

TIDAK BOLEH GOOGLE DRIVE, TIDAK PERLU PERNYATAAN.

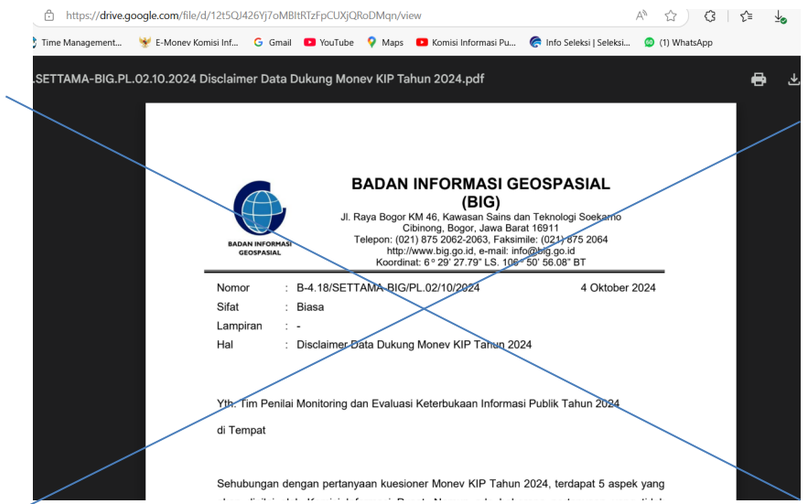

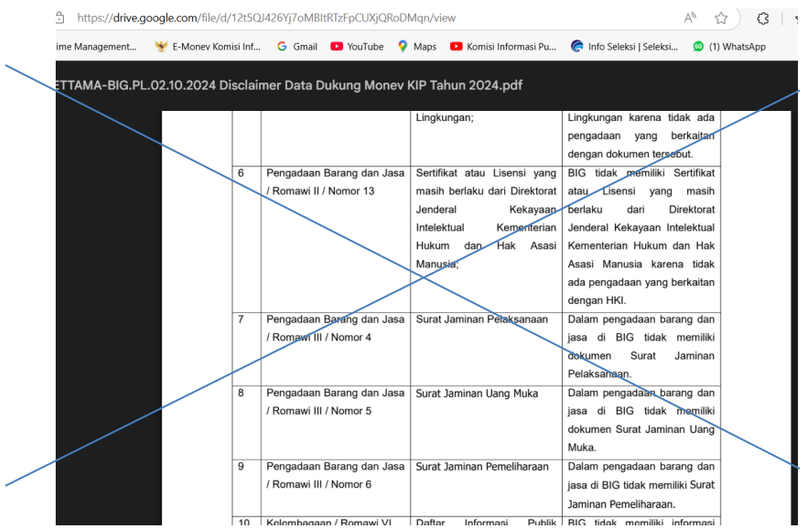

CONTOH PENYAJIAN INFORMASI GRAFIS PBJ

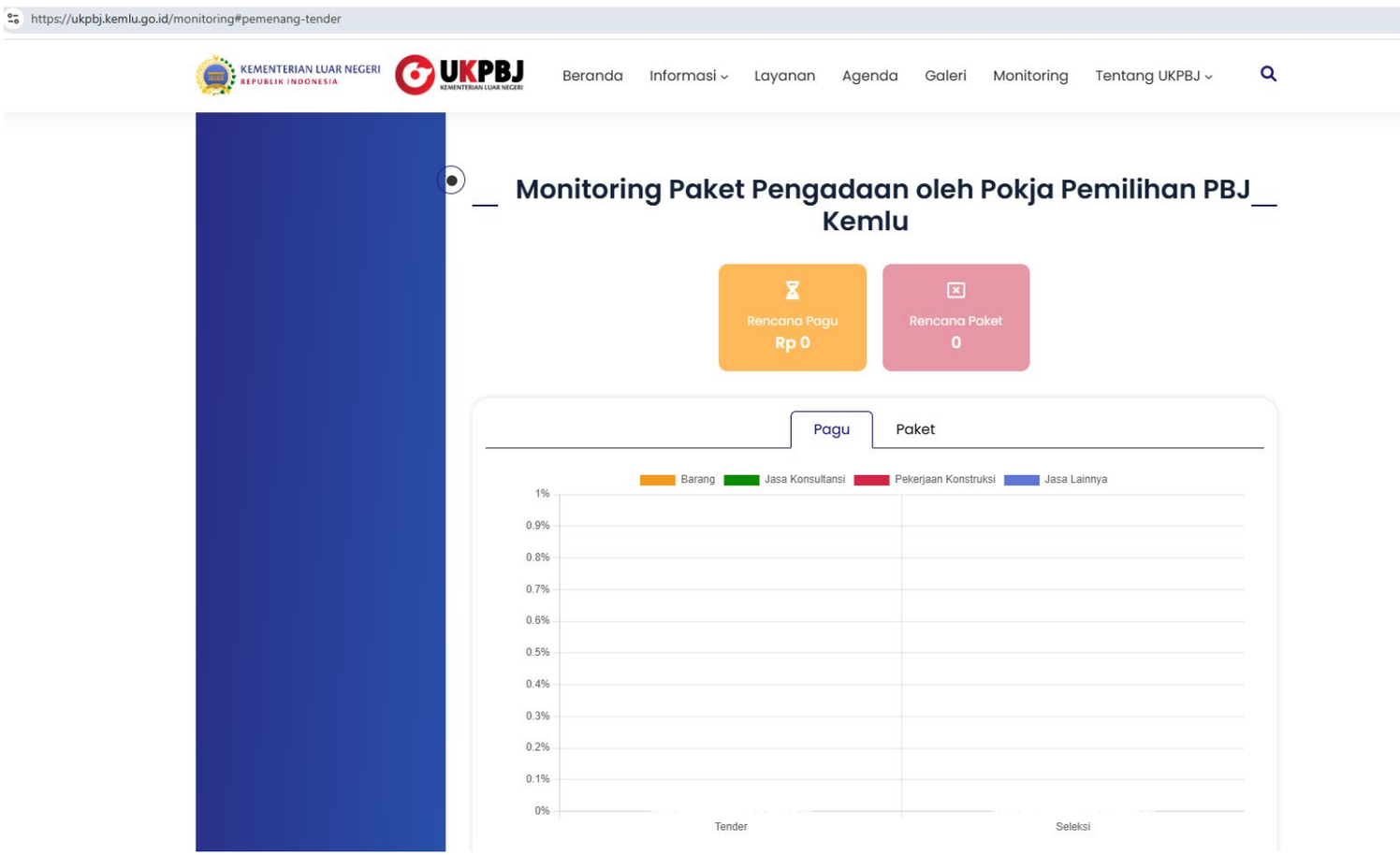

CONTOH PENYAJIAN INFORMASI GRAFIS PBJ

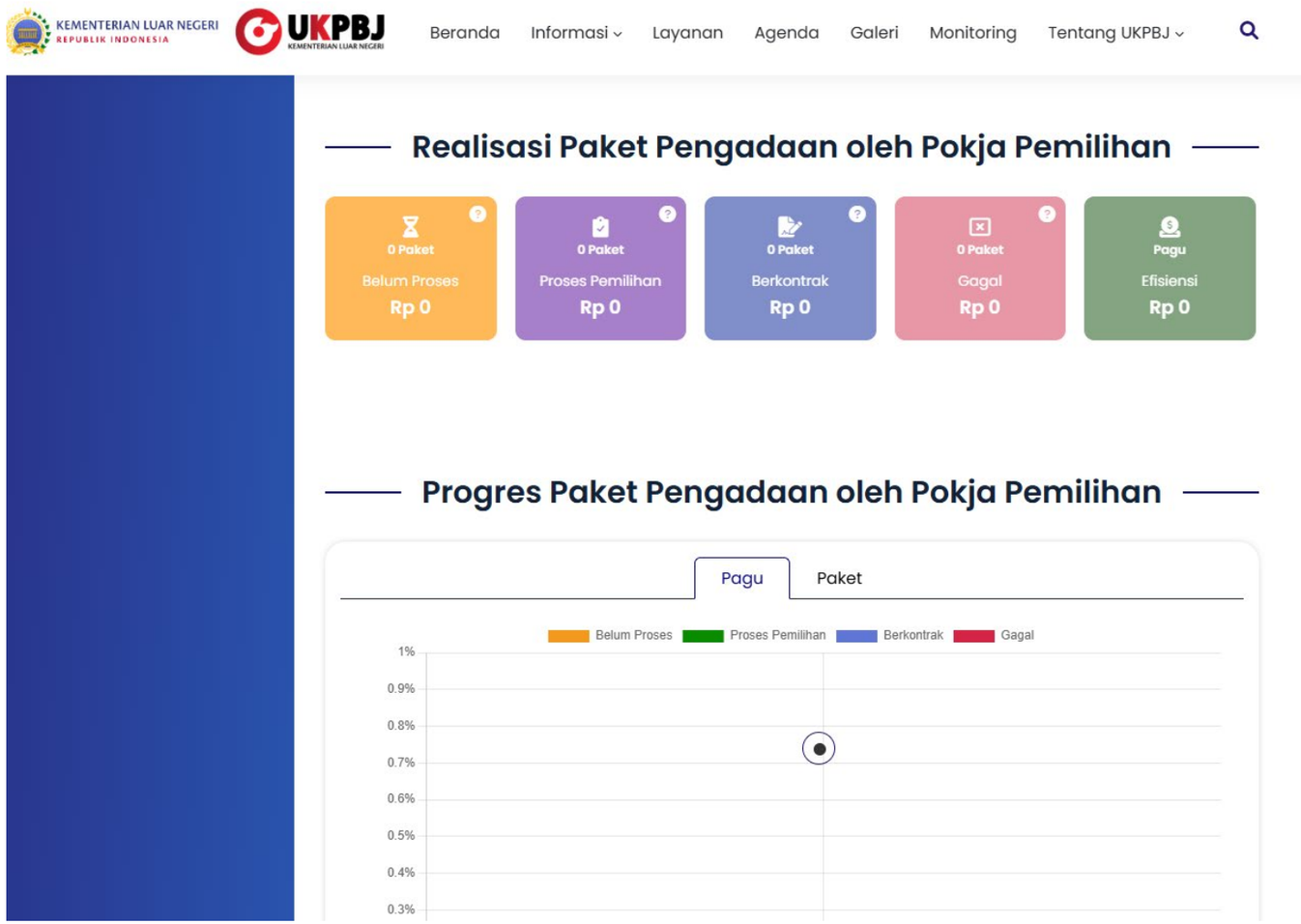

CONTOH PENYAJIAN INFORMASI GRAFIS PBJ

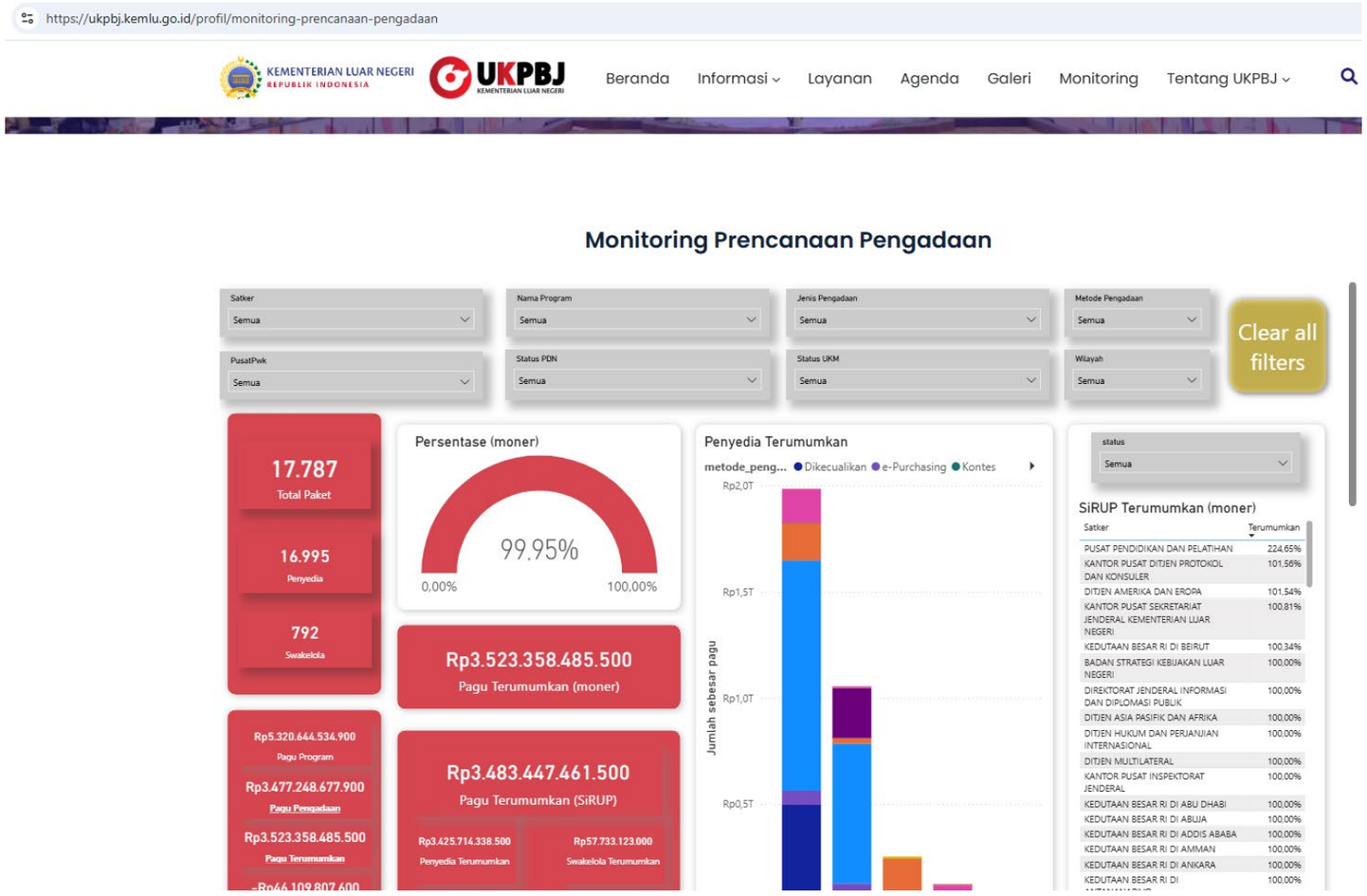

CONTOH PENYAJIAN LAYANAN INFORMASI PBJ

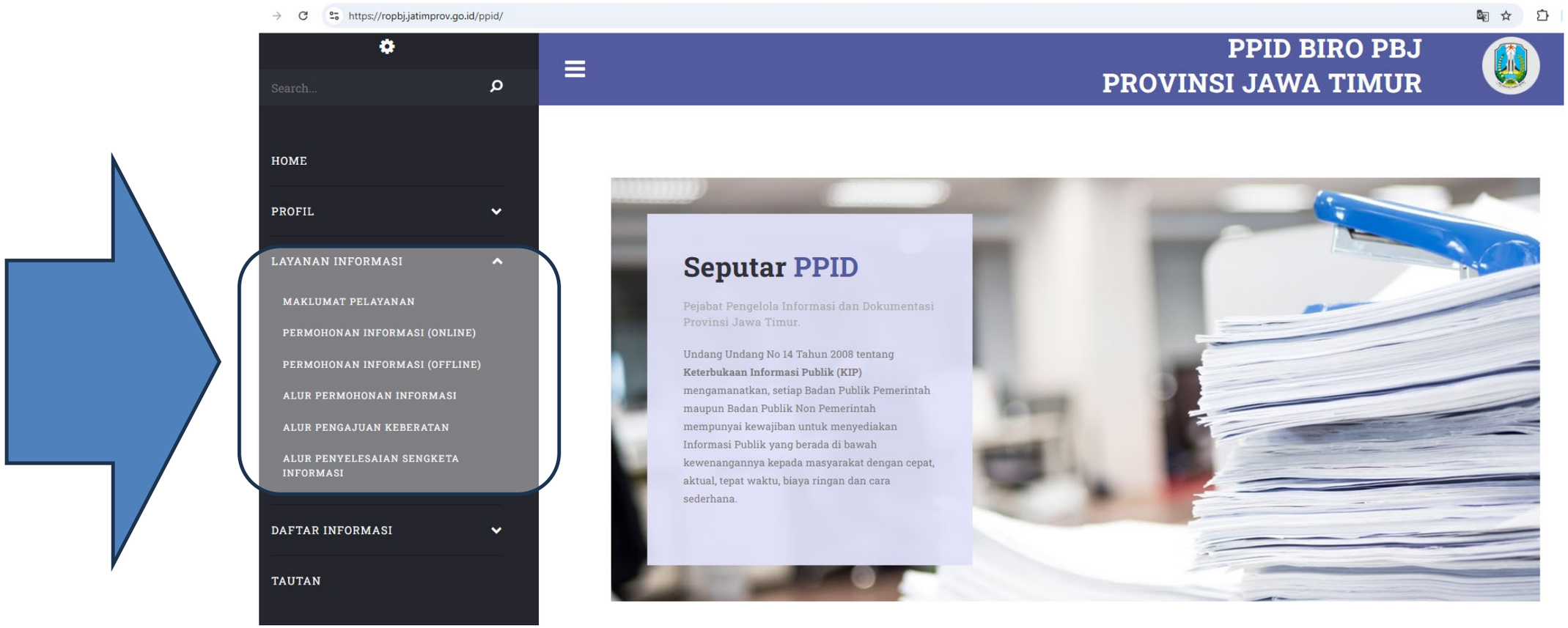

CONTOH PENYAJIAN INFORMASI GRAFIS PBJ

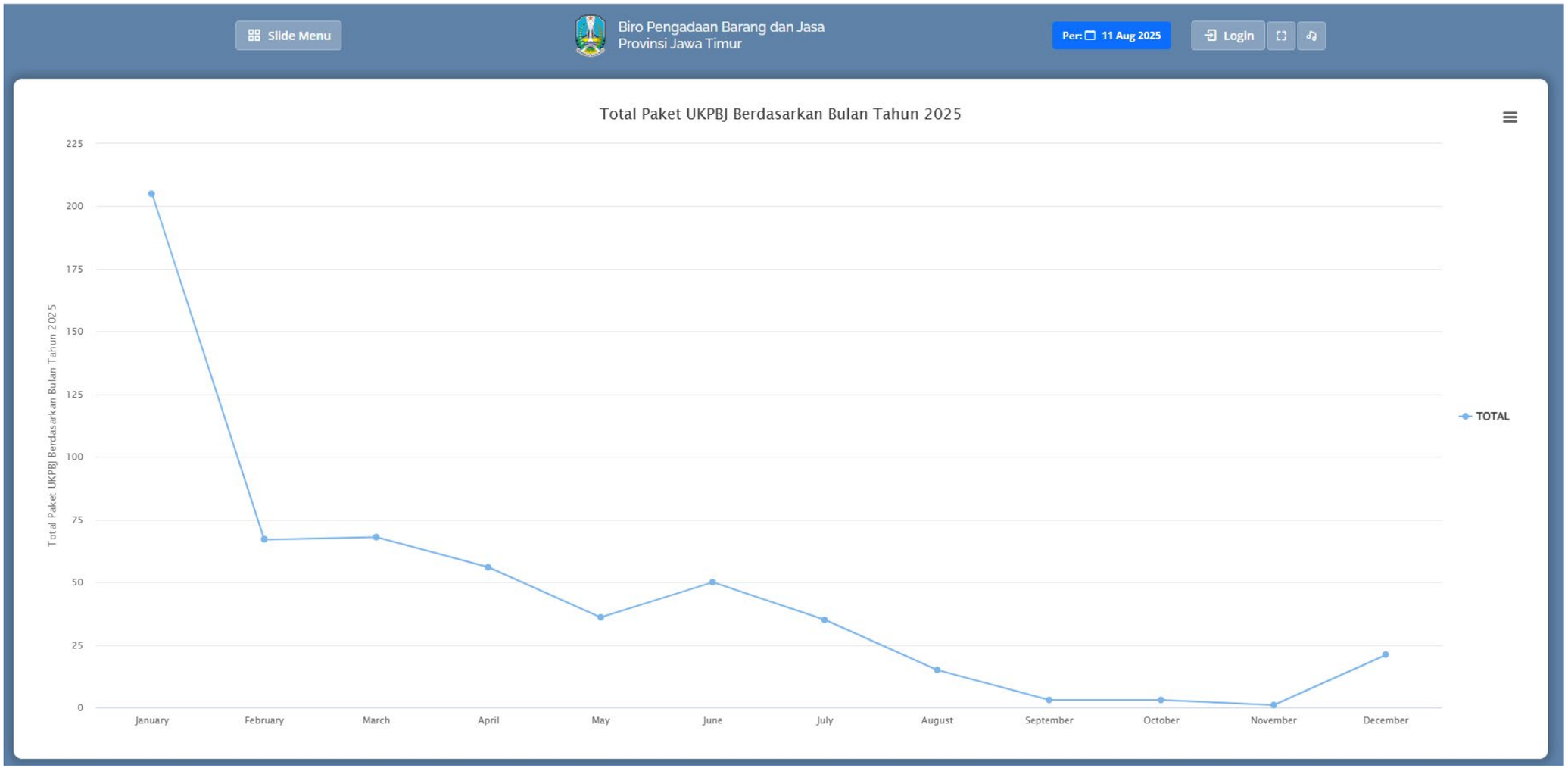

BEBERAPA CONTOH PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK

INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

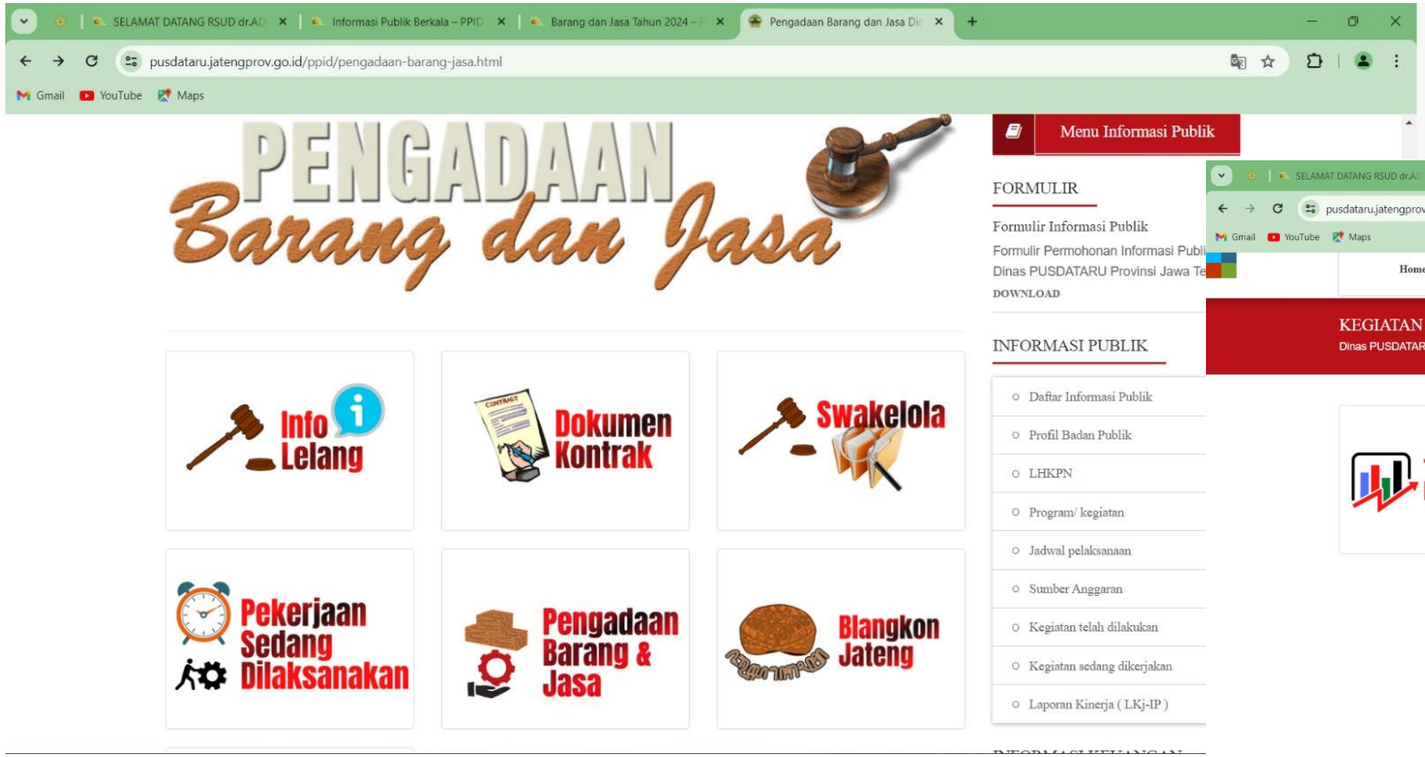

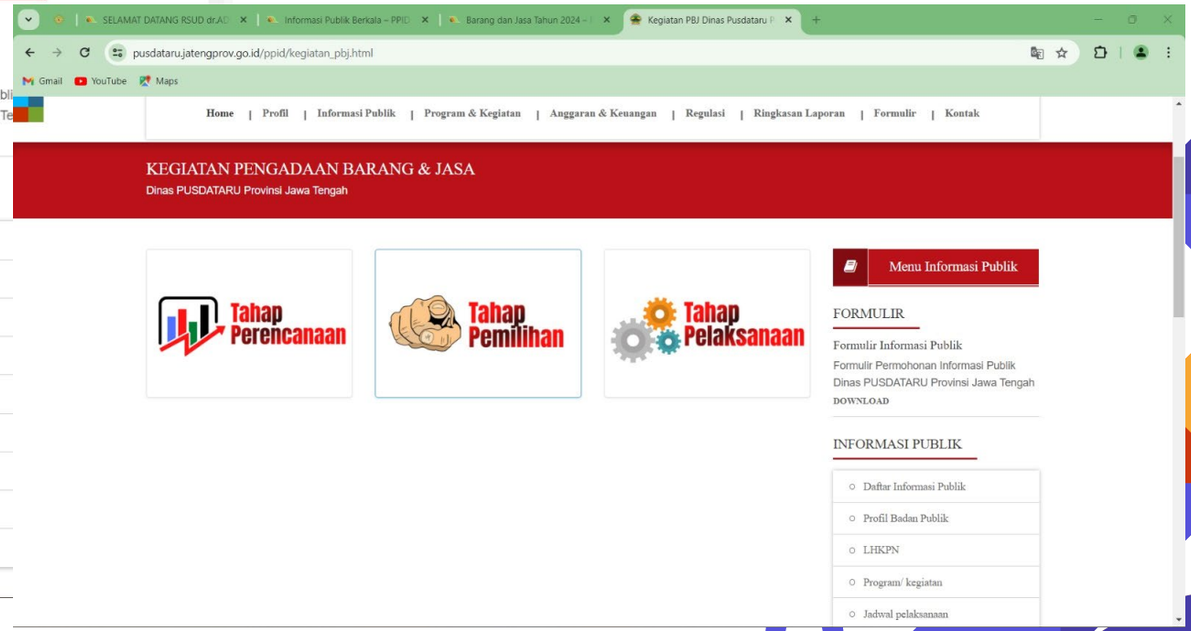

INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

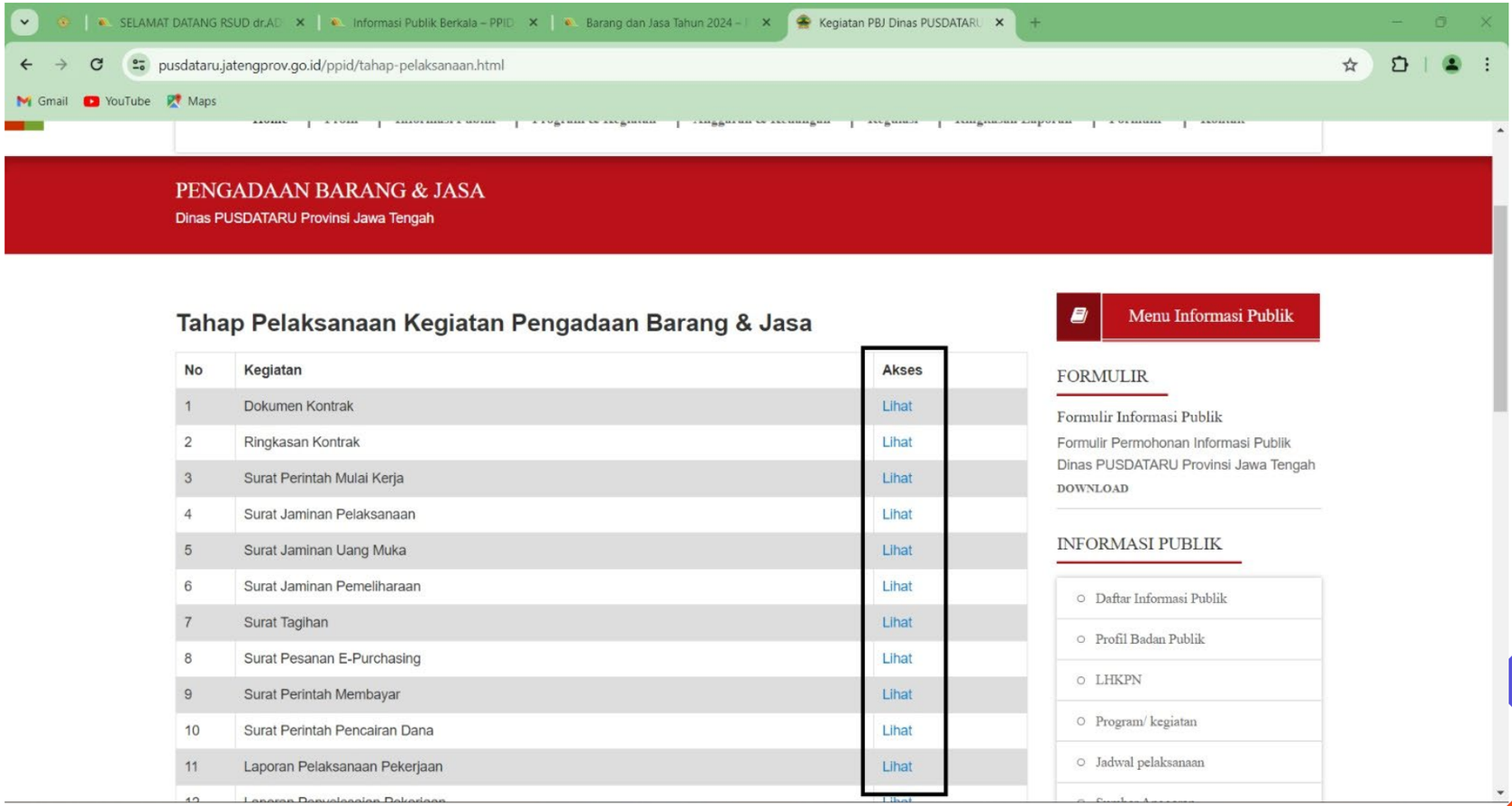

INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

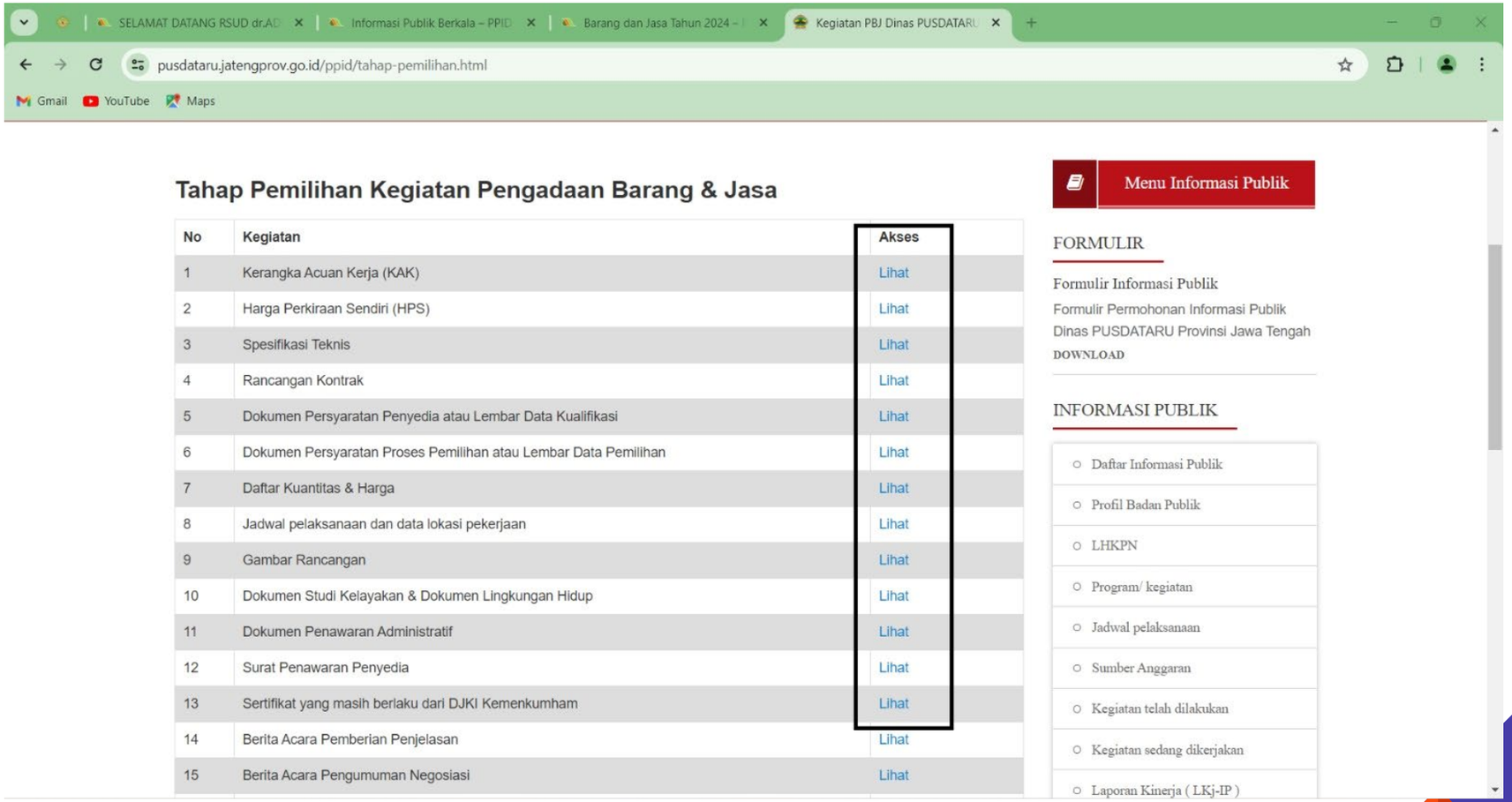

INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

Tahap Perencanaan- Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang & Jasa

Memuat rencana umum pengadaan barang dan jasa baik dengan metode tender atau metode lain yang dilakukan oleh biro APBJ maupun yang akan dilakukan oleh pokja/panitia pengadaan barang jasa RSUD Prof Dr margono Soekarjo tahun 2024

Jumlah Paket pengadaan barang jasa dengan metode s.d April 2024 :

- Pengadaan langsung : 42 Paket senilai Rp.5.182.996.545
- e-Purchasing: 81 paket pengadaan senilai Rp.194.684.971.000
- Dikecualikan : 84 paket pengadaan senilai Rp. 78.748.640.255
- Seleksi: 1 paket pengadaan senilai Rp.650.000.000
- Tender : 1 paket pengadaan senilai Rp. 878.903.200
- Swakelola : 10 paket pengadaan senilai Rp. 169.289.940.000

Penanggungjawab Pembuatan Informasi	: Unit Layanan Pengadaan
Waktu Pembuatan / Penerbitan Informasi	: Update data tahun 2024 / RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Bentuk Informasi Yang Tersedia	: Hard & Soft (file_pdf)
Jangka Waktu Penyimpanan	: selama masih berlaku
Jenis Media Yang Memuat Informasi	: Dokumen RUP

Open data:

https://rsmargono.jatengprov.go.id/rsms-opendata/datasheet/index/?q=rencana%20umum%20pengadaan

INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
E PURCASING/EKATALOG

Nomor: 654/CS/PPK/PSP-600/IV/2025

LAMPIRAN:

fix 05082025_Pengumuman Paket Kapuas 1449 Ha FUPR_signed

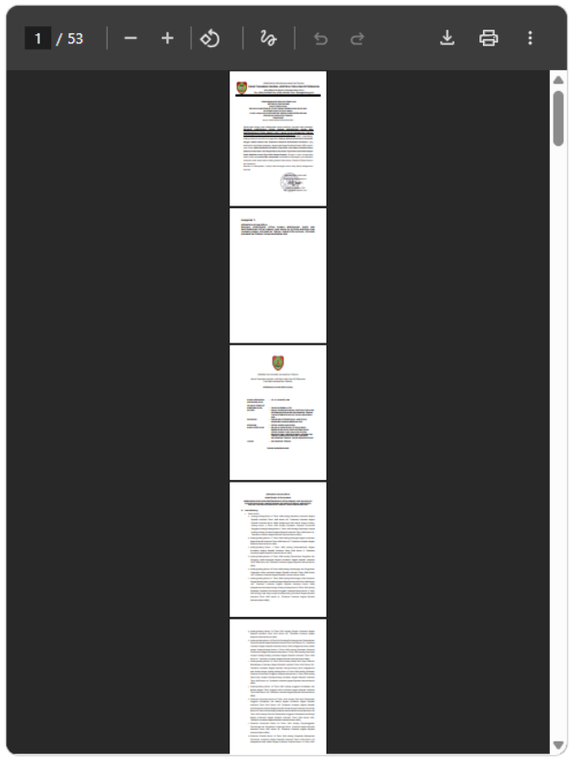

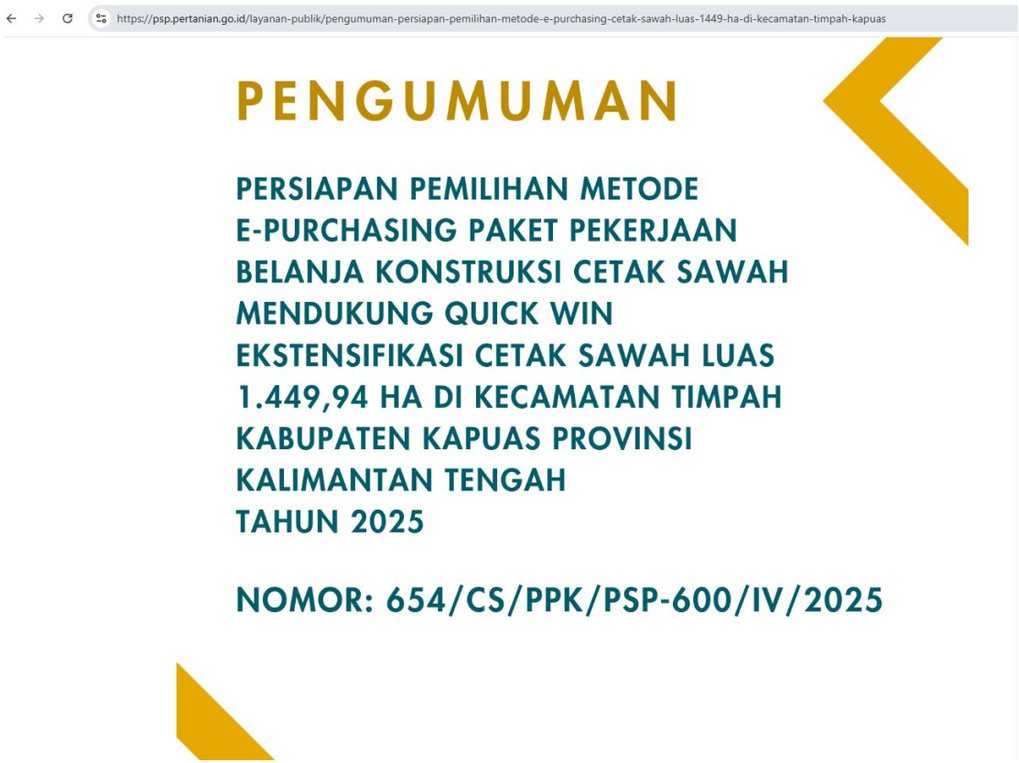

INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
E PURCASING/EKATALOG

DOK KAK

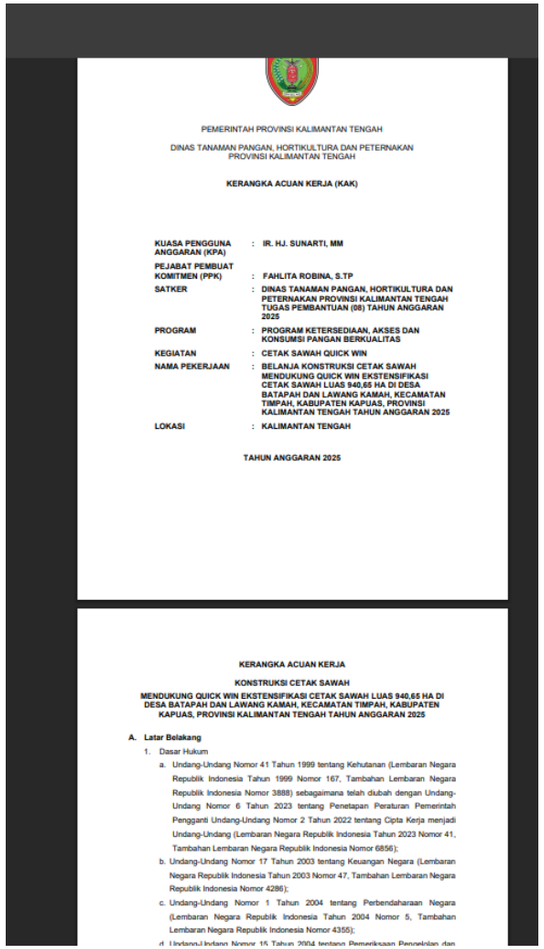

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	:	IR. HJ. SUNARTI, MM
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	:	FAHLITA ROBINA, S.TP
SATKER	:	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TUGAS PEMBANTUAN (08) TAHUN ANGGARAN 2025
PROGRAM	:	PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS
KEGIATAN	:	CETAK SAWAH QUICK WIN
NAMA PEKERJAAN	:	BELANJA KONSTRUKSI CETAK SAWAH MENDUKUNG QUICK WIN EKSTENSIFIKASI CETAK SAWAH LUAS 940,65 HA DI DESA BATAPAH DAN LAWANG KAMAH, KECAMATAN TIMPAH, KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025
LOKASI	:	KALIMANTAN TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA

KONSTRUKSI CETAK SAWAH

MENDUKUNG QUICK WIN EKSTENSIFIKASI CETAK SAWAH LUAS 940,65 HA DI DESA BATAPAH DAN LAWANG KAMAH, KECAMATAN TIMPAH, KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum
   a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
   b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
   c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
   d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolan dan

DOK TEKNIS

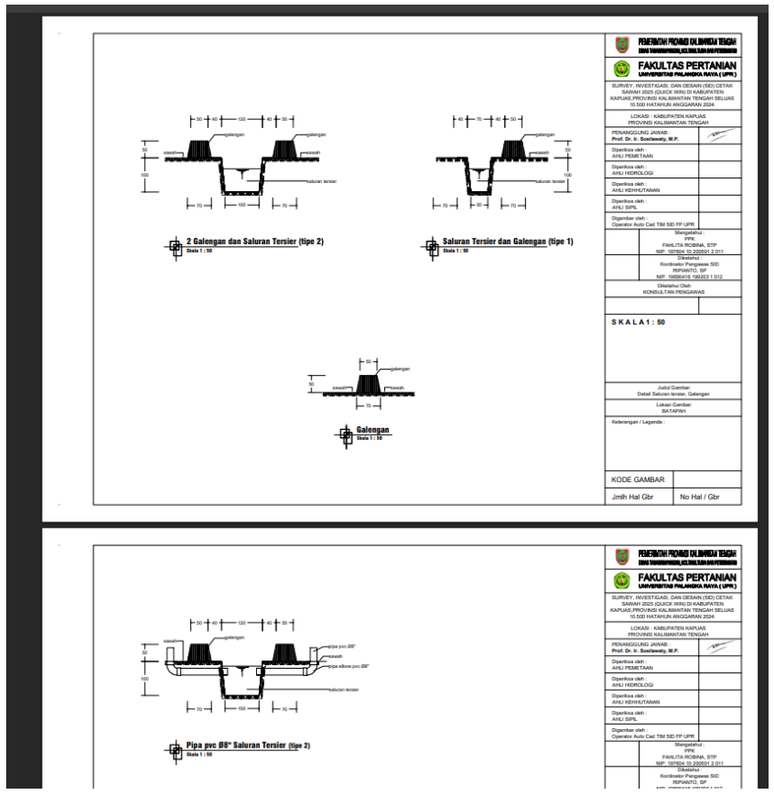

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)

SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS,PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024

LOKASI : KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PENANGGUNG JAWAB :
Prof. Dr. Ir. Sosiawaty, M.P.

Diperiksa oleh :
AHLI PEMETAAN

Diperiksa oleh :
AHLI HIDROLOGI

Diperiksa oleh :
AHLI KEHUTANAN

Diperiksa oleh :
AHLI SIPIL

Digambar oleh :
Operator Auto Cad TIM SID FP UPR

Mengetahui :
PPK
FAHLITA ROBINA, STP
NIP. 197804 10 200501 2 011

Disetujui :
Koordinator Pengawas SID
RIPIANTO, SP
NIP. 19690418 199203 1 012

Disetujui Oleh
KONSULTAN PENGAWAS

S K A L A 1 : 50

Judul Gambar :
Detail Saluran tersier, Galengan

Lokasi Gambar :
BATAPAH

Keterangan / Legenda :

KODE GAMBAR

Jmlh Hal Gbr | No Hal / Gbr

2 Galengan dan Saluran Tersier (tipe 2)
Skala 1 : 50

Saluran Tersier dan Galengan (tipe 1)
Skala 1 : 50

Galengan
Skala 1 : 50

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA (UPR)

SURVEY, INVESTIGASI, DAN DESAIN (SID) CETAK SAWAH 2025 (QUICK WIN) DI KABUPATEN KAPUAS,PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS 10.500 HATAHUN ANGGARAN 2024

LOKASI : KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PENANGGUNG JAWAB :
Prof. Dr. Ir. Sosiawaty, M.P.

Diperiksa oleh :
AHLI PEMETAAN

Diperiksa oleh :
AHLI HIDROLOGI

Diperiksa oleh :
AHLI KEHUTANAN

Diperiksa oleh :
AHLI SIPIL

Digambar oleh :
Operator Auto Cad TIM SID FP UPR

Mengetahui :
PPK
FAHLITA ROBINA, STP
NIP. 197804 10 200501 2 011

Disetujui :
Koordinator Pengawas SID
RIPIANTO, SP

Pipa pvc Ø8" Saluran Tersier (tipe 2)
Skala 1 : 50

INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
E PURCASING/EKATALOG

DOK BAST

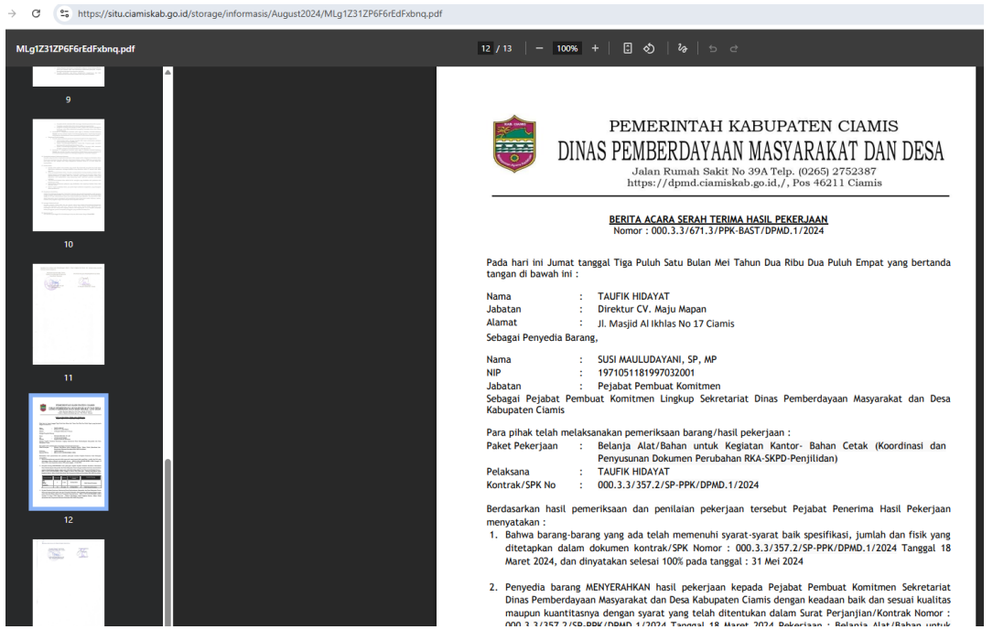

https://situ.ciamiskab.go.id/storage/informasis/August2024/MLg1Z31ZP6F6rEdFxbnq.pdf

MLg1Z31ZP6F6rEdFxbnq.pdf 12 / 13 100%

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Rumah Sakit No 39A Telp. (0265) 2752387
https://dpmd.ciamiskab.go.id,/, Pos 46211 Ciamis

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
Nomor : 000.3.3/671.3/PPK-BAST/DPMD.1/2024

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TAUFIK HIDAYAT
Jabatan : Direktur CV. Maju Mapan
Alamat : Jl. Masjid Al ikhlas No 17 Ciamis
Sebagai Penyedia Barang,

Nama : SUSI MAULUDAYANI, SP, MP
NIP : 197105118199703200 1
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis

Para pihak telah melaksanakan pemeriksaan barang/hasil pekerjaan :
Paket Pekerjaan : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD-Penjilidan)
Pelaksana : TAUFIK HIDAYAT
Kontrak/SPK No : 000.3.3/357.2/SP-PPK/DPMD.1/2024

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian pekerjaan tersebut Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menyatakan :

1. Bahwa barang-barang yang ada telah memenuhi syarat-syarat baik spesifikasi, jumlah dan fisik yang ditetapkan dalam dokumen kontrak/SPK Nomor : 000.3.3/357.2/SP-PPK/DPMD.1/2024 Tanggal 18 Maret 2024, dan dinyatakan selesai 100% pada tanggal : 31 Mei 2024

2. Penyedia barang MENYERAHKAN hasil pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis dengan keadaan baik dan sesuai kualitas maupun kuantitasnya dengan syarat yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 000.3.3/357.2/SP-PPK/DPMD.1/2024 Tanggal 18 Maret 2024 Pekerjaan : Belanja Alat/Bahan untuk

DOK SURAT PESANAN

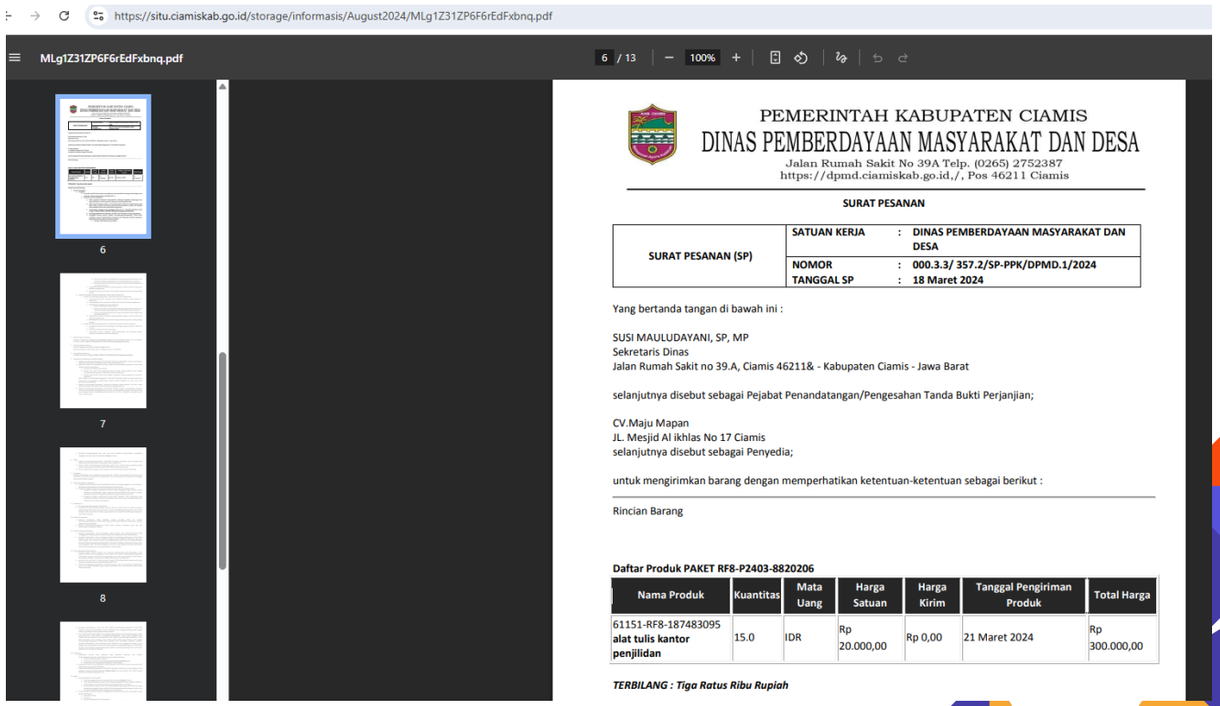

https://situ.ciamiskab.go.id/storage/informasis/August2024/MLg1Z31ZP6F6rEdFxbnq.pdf

MLg1Z31ZP6F6rEdFxbnq.pdf 6 / 13 100%

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Rumah Sakit No 39A Telp. (0265) 2752387
https://dpmd.ciamiskab.go.id,/, Pos 46211 Ciamis

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	NOMOR : 000.3.3/ 357.2/SP-PPK/DPMD.1/2024
	TANGGAL SP : 18 Maret 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

SUSI MAULUDAYANI, SP, MP
Sekretaris Dinas
Jalan Rumah Sakit no 39.A, Ciamis 46211& - Kabupaten Ciamis - Jawa Barat

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

CV.Maju Mapan
JL. Mesjid Al ikhlas No 17 Ciamis
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET RF8-P2403-8820206

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
61151-RF8-187483095 **alat tulis kantor penjilidan**	15.0	IDR	Rp 20.000,00	Rp 0,00	21 Maret 2024	Rp 300.000,00

TERBILANG : Tiga Ratus Ribu Rupiah

BEBERAPA CONTOH PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK

DAFTAR INFORMASI ONLINE

BEBERAPA CONTOH PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK

BUKAN DAFTAR INFORMASI ONLINE

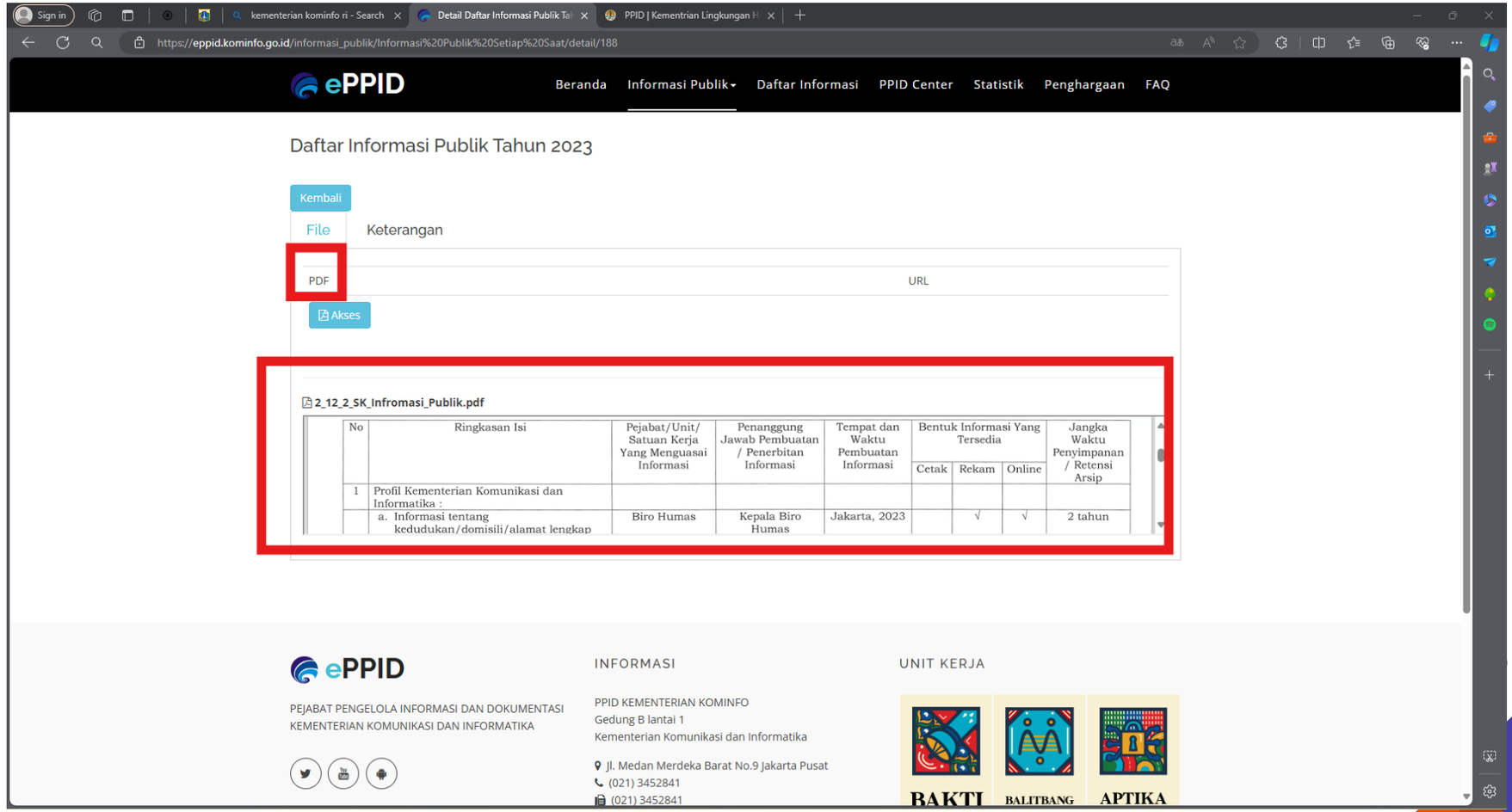

PENILAIAN KUESIONER : KELEMBAGAAN

5) Kelembagaan.

a) Badan Publik diharuskan menyediakan bukti-bukti pengembangan kelembagaan sesuai parameter penilaian.

CATATAN BPIP

Untuk ditambahkan:

1. Daftar Informasi Publik dimutakhirkan tahun 2025 yang sesuai format.
2. Ditambahkan deskripsi informasi.
3. Informasi Pengadaan Barang dan Jasa tersendiri pada website.
4. Ada tautan langsung ke INAPROC

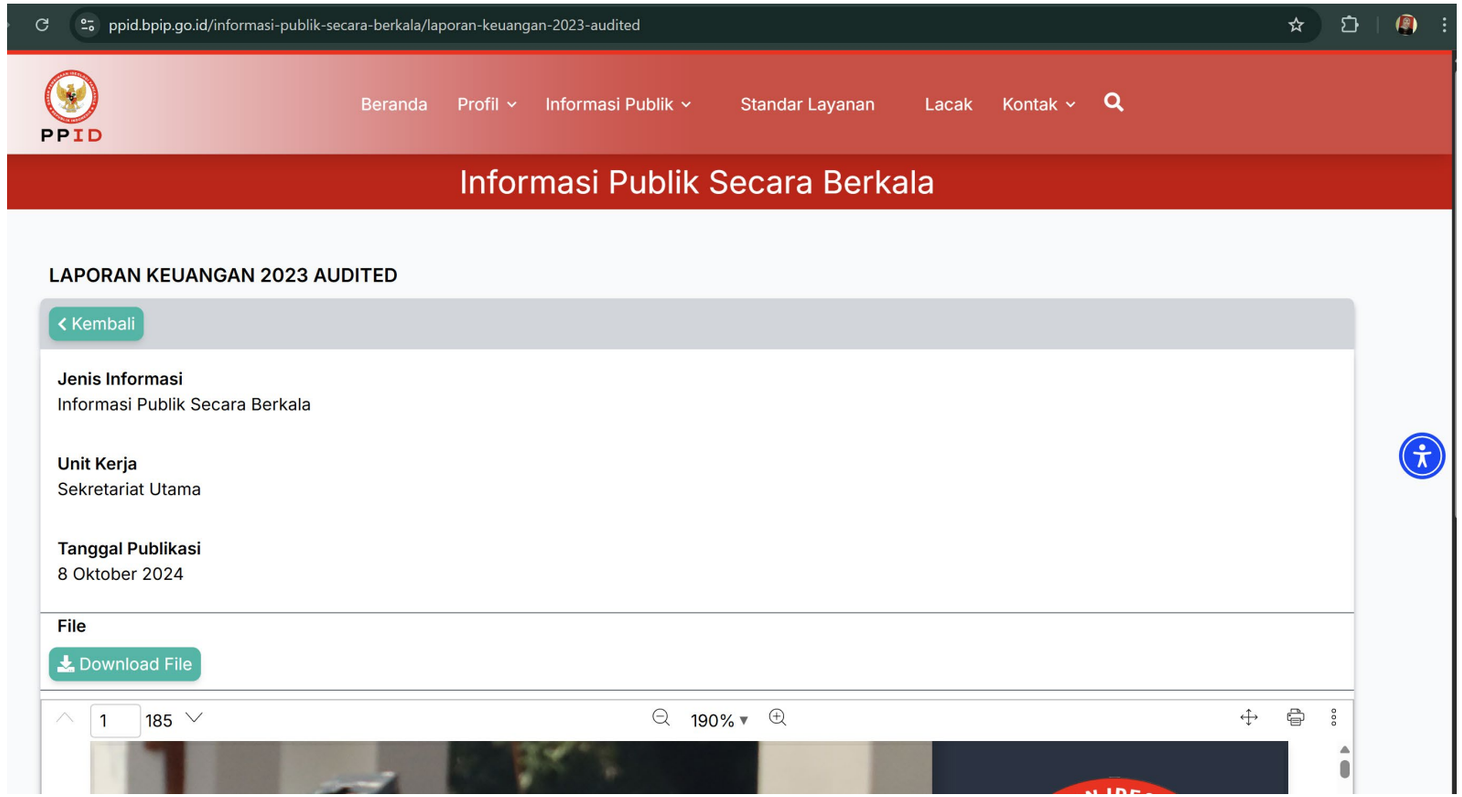

Untuk dimuatnya ringkasan informasi.

KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN SAQ MONEV 2024

Kementerian, LN & LPNK, LNS

MENGUMUMKAN INFORMASI PUBLIK

Monev
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

NO	PERTANYAAN	TERSEDIA		BUKTI PELAKSANAAN
		Ya	Tidak	
I	**Mengumumkan Informasi Tentang Profil Badan Publik**			
1	Mengumumkan informasi :			
a	Alamat lengkap			PPID memberikan link website dan tangkapan layar berisi alamat
b	Ruang lingkup (Kewenangan)			PPID memberikan link website dan tangkapan layar berisi yang memuat informasi ruang lingkup
c	Tugas dan fungsi serta kantor unit-unit dibawahnya			PPID memberikan link website dan tangkapan layar yang memuat informasi tugas dan fungsi dari Unit Kerja/Kantor Wilayah/Badan di lingkungan Kementerian/Lembaga/Badan (bukan upload peraturan/keputusan)
d	Struktur organisasi			PPID memberikan link website dan tangkapan layar yang memuat informasi struktur Kementerian/Lembaga/Badan (bukan upload peraturan/keputusan)
e	Profil singkat pimpinan tertinggi Kementerian/Lembaga/Badan serta pejabat lainnya			PPID memberikan link website dan tangkapan layar yang memuat informasi profil Pimpinan tertinggi dan pejabat lainnya baik dalam bentuk dokumen elektronik atau informasi elektronik lainnya.
2	Mengumumkan LHKPN Pejabat Negara yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam website (bukan dalam bentuk link KPK) yang terdiri dari:			
a	Pimpinan tertinggi Badan Publik			PPID memberikan link website dan tangkapan layar yang memuat informasi LHKPN pimpinan tertinggi BUKAN dalam bentuk link KPK (Bukan link KPK/https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/login#announ)
b	Pejabat Eselon I di lingkungan instansi Badan Publik			PPID memberikan link website dan tangkapan layar yang memuat informasi LHKPN para pejabat yang wajib LHKP (Sekretariat Jenderal, Direktur Jendela, Sekretaris Utama/Sekretaris dan pejabat lainnya). (Bukan link KPK/https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/login#announ)
II	**Mengumumkan Informasi Tentang Program dan/atau Kegiatan**			
1	Mengumumkan informasi program-program atau kegiatan Tahun 2024 yang memuat nama program/kegiatan, penanggungjawab/pelaksana, target, jadwal pelaksanaan dan sumber anggaran serta besaran anggaran.			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi baik dalam bentuk informasi elektronik maupun data digital (soft copy)/dokumen elektronik yang memuat seluruh program yang sesuai dengan indikator pertanyaan

MENGUMUMKAN INFORMASI PUBLIK

Monev
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

2	Mengumumkan program strategis atau prioritas Kementerian/Lembaga/Badan Tahun 2024 yang sekurang-kurangnya memuat nama program, besaran dan sumber anggaran, serta satuan kerja yang menangani.			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi baik dalam bentuk informasi elektronik maupun data digital (soft copy)/dokumen elektronik hanya program strategis/prioritas yang dilengkapi antara lain sumber dan besaran anggaran, target penyelesaian, penanggung jawab.
3	Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Kementerian/Lembaga/Badan (kalender kegiatan).			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi baik dalam bentuk informasi elektronik maupun data digital (soft copy)/dokumen elektronik tentang agenda Badan Publik.
4	Informasi khusus pelayanan publik lainnya yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat.			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi baik dalam bentuk informasi elektronik yang berkaitan hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik sesuai tupoksi Kementerian/Lembaga/Badan.
5	Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat negara.			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi baik dalam bentuk informasi elektronik yang seleksi pegawai atau seleksi terbuka pimpinan dan sejenisnya.
6	Mengumumkan informasi ringkasan kinerja (atau nama lain) atas program/kegiatan yang telah maupun sedang dilaksanakan berupa realisasi kegiatan beserta capainnya.			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi dalam bentuk informasi elektronik atau sejenisnya yang memuat capaian realisasi kegiatan yang telah atau sedang dilaksanakan di tahun 2024 (bukan upload dokumen LRA atau LKPj dan sejenisnya)
7	Mengumumkan dan menyediakan dokumen Laporan Tahunan Tahun 2023			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen digital tentang laporan tahunan Tahun 2023.
III	**Mengumumkan Informasi Keuangan**			
1	Mengumumkan informasi laporan keuangan tahun 2023 yang telah diaudit yang terdiri atas: Rencana dan Laporan Realisasai Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas (CALK), dan laporan daftar aset dan investasi (wajib lengkap)			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen digital yang memuat lengkap dokumen laporan keuangan Tahun 2023 lengkap.

MENGUMUMKAN INFORMASI PUBLIK

2	Mengumumkan dalam terkait informasi keuangan Tahun 2024 dalam bentuk:			
a	RKA			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen digital yang memuat Dokumen RKA Tahun 2024.
b	DIPA			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen digital yang memuat Dokumen DPA Tahun 2024.
c	Informasi realisasi atau penyerapan penggunaan keuangan Tahun 2024			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen digital yang memuat informasi real time realisasi keuangan Tahun 2024.
IV	**Mengumumkan Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2023 - 2024;**			
1	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima;			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen digital yang memuat jumlah permohonan informasi tahun 2023 dan Tahun 2024
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen digital yang memuat informasi rata-rata waktu penyelesaian permohonan informasi Tahun 2023 dan Tahun 2024
3	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak;			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen digital yang permohonan informasi yang diterima atau tidak dikabulkan seluruhnya atau sebagian Tahun 2023 dan Tahun 2024

MENGUMUMKAN INFORMASI PUBLIK

4	Alasan penolakan Permintaan Informasi Publik.			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen digital yang memuat informasi alasan penolakan permohonan informasi Tahun 2023 dan Tahun 2024
V	**Mengumumkan Informasi tentang Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat/berdampak bagi publik, yang terdri atas:**			
1	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen digital yang memuat daftar rancangan peraturan menteri/peraturan lembaga/peraturan badan dan tahapan pembuatannya Tahun 2024
2	Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen digital yang memuat daftar perda/pergub yang telah disahkan dan ditetapkan Tahun 2024 (JDIH/sejenisnya).
VI	**Mengumumkan Informasi tentang Prosedur Memperoleh Informasi Publik di Website dan Sarana Lainnya**			
1	Tata cara memperoleh Informasi Publik disertai informasi waktu dan syarat permohonan;			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi dalam bentuk informasi elektronik yang memuat Tata cara memperoleh Informasi Publik disertai informasi waktu dan syarat permohonan.
2	Tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi dalam bentuk informasi elektronik yang memuat Tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi.

MENGUMUMKAN INFORMASI PUBLIK

VII	**Mengumumkan Informasi Tentang Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran oleh Badan Publik;**			
1	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Badan Publik;			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi dalam bentuk informasi elektronik yang memuat Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi.
2	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Kementerian/Lembaga/Badan yang bersangkutan.			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi dalam bentuk informasi elektronik yang memuat Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik.

MENYEDIAKAN DOKUMEN IP

NO	PERTANYAAN	TERSEDIA		BUKTI PELAKSANAAN
		Ya	Tidak	
	INFORMASI YANG TERSEDIA SETIAP SAAT			
I	**Daftar Informasi Publik**			
1	Menyediakan Daftar Informasi Publik terakhir tahun 2024 yang telah ditetapkan sesuai dengan format Perki 1/2021			PPID menunjukan dokumen PPID berupa SK penetapan disertai lampiran DIP yang telah disahkan pejabat berwenang.
2	Menyediakan Daftar Informasi Online yang menyediakan akses dokumen			PPID memberikan link website dan tangkapan layar berisi Daftar Informasi Publik onlike yang menyediakan akses dokumen.

MENYEDIAKAN DOKUMEN IP

Monev
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

3	Daftar Informasi Publik Online memberikan akses publik atas dokumen-dokumen sebagai berikut:			
a	Dokumen-dokumen elektronik berkaitan Keuangan Tahun 2022 - 2024			PPID memberikan alamat link website yang menyediakan dokumen-dokumen keuangan tahun 2023.
b	Dokumen-dokumen elektronik berkaitan program dan kegiatan Tahun 2022 - 2024			PPID memberikan alamat link website yang menyediakan dokumen-dokumen program dan kegiatan Tahun 2023.
c	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang telah selesai pekerjaan dan serah terima Tahun 2022 - 2023 (minimal 2 paket dan berkesesuaian antar tahapan)			Yang dimaksud dokumen pengadaan barang dan jasa adalah dokumen utuh (bukan bagian foto dokumen), yang dilaksanakan dengan metode swakelola/penunjukan langsung atau tender.
i	Dokumen Rencana Umum Pengadaan sesuai Pasal 14 ayat ayat 2 huruf i dan Pasal 15 ayat 9 Perki 1 Tahun 2021			PPID memberikan alamat link website yang menyediakan dokumen-dokumen tahap perencanaan paket.
ii	Dokumen-dokumen Tahap Pemilihan sesuai Pasal 14 ayat ayat 2 huruf i dan Pasal 15 ayat 9 Perki 1 Tahun 2021, minimal 5 jenis dokumen berbeda dalam 1 paket pekerjaan.			PPID memberikan alamat link website yang menyediakan dokumen-dokumen tahap pemilihan sesuai persyaratan pelelangan. Dokumen harus sesuai dengan paket dalam tahap perencanaan.
iii	Dokumen-dokumen Tahap Pelaksanaan sesuai Pasal 14 ayat ayat 2 huruf i dan Pasal 15 ayat 9 Perki 1 Tahun 2021, minimal 5 jenis dokumen berbeda dalam 1 paket pekerjaan.			PPID memberikan alamat link website yang menyediakan dokumen-dokumen tahap pelaksanaan sesuai persyaratan pelelangan. Dokumen harus sesuai dengan paket dalam tahap perencanaan dan pemilihan
4	Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya yang telah dinyatakan terbuka Tahun 2023-2024 dan tertuang dalam DIP Tahun 2024			PPID memberikan alamat link website yang menyediakan dokumen-dokumen surat perjanjian atau MoU yang tercantum dalam DIP.
II	**Informasi tentang tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Kementerian/Lembaga/Badan Tahun 2023-2024 yang sekurang-kurangnya terdiri dari:**			**PPID menunjukkan satu kesatuan dokumen peraturan/keputusan/kebijakan yang terdiri dari masukan, risalah rapat, rancangan keputusan, tahap dan peraturan yang diterbitkan.**
1	Menyediakan dokumen masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk			Contoh: Masukan Asosiasi Sarjana Akuntan Publik terhadap rancangan peraturan tentang Akreditasi Akuntan Publik.
2	Menyediakan dokumen risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk			Contoh: Risalah Asosiasi Sarjana Akuntan Publik terhadap rancangan peraturan tentang Akreditasi Akuntan Publik.

MENYEDIAKAN DOKUMEN IP

Monev
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

3	Menyediakan dokumen rancangan peraturan, keputusan kebijakan yang dibentuk;			Contoh: Dokumen rancangan Akreditasi Akuntan Publik.
4	Menyediakan dokumen tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk;			Contoh : Dokumen Tahapan pembuatan peraturan Akreditasi Akuntan Publik.
5	Menyediakan dokumen peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan.			Contoh: Peraturan Kementerian/Lembaga/Badan X No 1 Tahun 2024 tentang Penataan Akreditasi Akuntan Publik.
III	**Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian :**			
1	Dokumen pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil			PPID memperlihatkan daftar dokumen tentang pengelolaan organisasi, administrasi dan contoh foto dokumen tersebut.
2	Dokumen profil pimpinan dan pegawai			PPID memperlihatkan daftar dokumen profil pimpinan dan pegawai dan contoh dokumen.
IV	Surat menyurat pimpinan atau pejabat Kementerian/Lembaga/Badan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya Tahun 2023-2024			PPID menunjukan penguasaan daftar dokumen surat menyurat dalam bentuk daftar dan contoh dokumen.
V	Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya 2023-2024;			PPID menunjukkan penguasaan tentang daftar dokumen yang memuat Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya 2023-2024 dan contoh dokumen
VI	Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya 2023-2024;			PPID menunjukan penguasaan daftar dokumen tentang dokumen yang memuat Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya 2023-2024 dan contoh dokumen

MENYEDIAKAN DOKUMEN IP

VII	Data perbendaharaan atau inventaris 2023- 2024.			PPID menunjukan penguasaan daftar dokumen tentang daftar data perbendaharaan atau laporan inventaris resmi 2023 - 2024 dan contoh dokumen.
VIII	Menyediakan dokumen rencana strategis Kementerian/Lembaga/Badan yang masih berlaku			PPID menunjukkan penguasaan daftar dokumen renstra yang masih berlaku dan contoh dokumen.

PENGEMBANGAN WEBSITE

Monev
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

NO	PERTANYAAN	TERSEDIA		BUKTI PELAKSANAAN
		Ya	Tidak	
I	**PROFIL PPID PADA LAMAN WEBSITE**			
	Website Kementerian/Lembaga/Badan mengumumkan informasi mengenai profil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi [PPID] antara lain yaitu:			
1	Gambaran Singkat Pembentukan PPID			PPID memberikan alamat link website dan tangkapan layar yang memuat informasi gambaran singkat pembentukan PPID
2	Visi dan Misi PPID			PPID memberikan alamat link website dan tangkapan layar yang memuat informasi visi dan misi PPID
3	Profil dan Struktut PPID			PPID memberikan alamat link website dan tangkapan layar yang memuat profil personil PPID
4	Tugas dan Tanggungjawab PPID dan PPID Pelaksana			PPID memberikan alamat link website dan tangkapan layar yang uraian tugas dan tanggung jawab PPID dan PPID Pelaksana
II	**WEBSITE PPID MENGUMUMKAN SOP LAYANAN INFORMASI PUBLIK**			
1	SOP Permintaan Informasi Publik			PPID memberikan alamat link website dan tangkapan layar yang memuat SOP Permohonan Informasi Publik
2	SOP Penanganan Keberatan			PPID memberikan alamat link website dan tangkapan layar yang memuat Penanganan Keberatan
3	SOP Penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik			PPID memberikan alamat link website dan tangkapan layar yang memuat penetapan dan pemutakhiran DIP
4	SOP Pegujian Konsekuensi			PPID memberikan alamat link website dan tangkapan layar yang memuat SOP pelaksanaan Uji Konsekuensi
5	SOP Pendokumentasian informasi publik			PPID memberikan alamat link website dan tangkapan layar yang memuat SOP pendokumentasian informasi publik
III	**AKSESIBILITAS WEBSITE PPID**			
1	Website Kementerian/Lembaga/Badan menyediakan menu Informasi Publik yang terdiri dari:			
a	Informasi Berkala yang menyediakan jenis-jenis informasi			PPID memberikan alamat website dan tangkapan layar Informasi Wajib Berkala disertai minimal 5 jenis informasi sesuai Pasal 14 dan Pasal 15 Perki Nomor 1 Tahun 2021

PENGEMBANGAN WEBSITE

b	Informasi Tersedia Setiap Saat yang memuat jenis-jenis informasi			PPID memberikan alamat website dan tangkapan layar Informasi Tersedia Setiap Saat disertai minimal 5 jenis informasi sesuai Pasal 14 dan Pasal 15 Perki Nomor 1 Tahun 2021
2	Website Kementerian/Lembaga/Badan memiliki/menyediakan layanan permohonan dan keberatan informasi secara online			PPID memberikan alamat website dan tangkapan layar menu permohonan informasi online atau elektronik
IV	**PELAYANAN INFORMASI PPID PELAKSANA (Sebutkan 3 contoh)**			
1	Nama PPID Pelaksana.....			
a	Informasi Wajib Berkala			PPID memberikan alamat website dan tangkapan layar menu Informasi Wajib Berkala lengkap tingkat PPID Pelaksana
b	Informasi Tersedia Setiap Saat			PPID memberikan alamat website dan tangkapan layar menu Informasi Tersedia Setiap Saat lengkap tingkat PPID Pelaksana
c	Daftar Informasi Publik			PPID memberikan alamat website dan tangkapan layar menu Daftar informasi berbasis dokumen yang disusun berdasarkan Perki 1/2021 dan disediakan secara online.
d	Permohonan informasi online (bukan mengunduh formulir permohonan)			PPID memberikan alamat website dan tangkapan layar menu permohonan informasi online atau elektronik
2	Nama PPID Pelaksana.....			
a	Informasi Wajib Berkala			PPID memberikan alamat website dan tangkapan layar menu Informasi Wajib Berkala lengkap tingkat PPID Pelaksana
b	Informasi Tersedia Setiap Saat			PPID memberikan alamat website dan tangkapan layar menu Informasi Tersedia Setiap Saat lengkap tingkat PPID Pelaksana
c	Daftar Informasi Publik			PPID memberikan alamat website dan tangkapan layar menu Daftar informasi berbasis dokumen yang disusun berdasarkan Perki 1/2021 dan disediakan secara online.

PENGEMBANGAN WEBSITE

d	Permohonan informasi online (bukan mengunduh formulir permohonan)			PPID memberikan alamat website dan tangkapan layar menu permohonan informasi online atau elektronik
3	Nama PPID Pelaksana.....			
a	Informasi Wajib Berkala			PPID memberikan alamat website dan tangkapan layar menu Informasi Wajib Berkala lengkap tingkat PPID Pelaksana
b	Informasi Tersedia Setiap Saat			PPID memberikan alamat website dan tangkapan layar menu Informasi Tersedia Setiap Saat lengkap tingkat PPID Pelaksana
c	Daftar Informasi Publik			PPID memberikan alamat website dan tangkapan layar menu Daftar informasi berbasis dokumen yang disusun berdasarkan Perki 1/2021 dan disediakan secara online.
d	Permohonan informasi online (bukan mengunduh formulir permohonan)			PPID memberikan alamat website dan tangkapan layar menu permohonan informasi online atau elektronik
V	**PENGEMBANGAN LAYANAN PUBLIK**			
1	Kementerian/Lembaga/Badan menyediakan aplikasi - aplikasi berkaitan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			PPID memberikan alamat link website yang menunjukkan penggunaan aplikasi-aplikasi atau sistem elektronik berkaitan implementasi SPBE yang memberikan hak akses kepada publik.
2	Menyediakan audio visual yang menayangkan layanan informasi publik/papan informasi elektronik/lainnya			PPID memberikan tangkapan layar penggunaan audio visual berkaitan layanan informasi.
3	Memiliki aplikasi yang memuat layanan keterbukaan informasi/PPID berbasis mobile (android/linux/IOS) yang dapat diakses untuk umum			PPID memberikan tangkapan layar dan alamat aplikasi mobile tentang keterbukaan informasi

PENGEMBANGAN WEBSITE

4	Akun media sosial Kementerian/Lembaga/Badan (twitter, facebook, instagram) aktif menyampaikan informasi publik terkait:			
a	Informasi publik terkait program strategis			PPID memberikan alamat url dan tangkapan layar yang menyajikan program strategis/prioritas Tahun 2024
b	Informasi publik terkait realisasi keuangan Tahun 2024			PPID memberikan alamat url dan tangkapan layar yang menyajikan informasi realisasi keuangan Tahun 2024

BARANG DAN JASA

Monev
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

NO	PERTANYAAN	TERSEDIA		BUKTI PELAKSANAAN
		Ya	Tidak	
I	**MENGUMUMKAN INFORMASI TAHAP PERENCANAAN**			
1	Kementerian/Lembaga/Badan mengumumkan rencana umum pengadaan melalui SIRUP atau sejenisnya Tahun 2024			PPID memberikan tangkapan layar dan alamat link website SIRUP yang menyajikan seluruh paket pengadaan
2	Sebutkan 2 (dua) rencana pengadaan dalam SIRUP atau sejenisnya Tahun 2024			PPID memberikan tangkapan layar atau print out data SIRUP yang menunjukkan nama paket dengan nilai pagu tertinggi
a	Nama Paket dan Pagu Nilai Paket tertinggi			PPID memberikan tangkapan layar atau print out data SIRUP yang menunjukkan nama paket dengan nilai pagu tertinggi
b	Nama Paket dan Pagu Nilai Paket tertinggi			PPID memberikan tangkapan layar atau print out data SIRUP yang menunjukkan nama paket dengan nilai pagu tertinggi
3	Sebutkan 2 (dua) pelelangan dalam LPSE atau sejenisnya Tahun 2024			
a	Nama Paket dan Pagu Nilai Paket tertinggi			PPID memberikan tangkapan layar dan alamat link LPSE yang menunjukkan nama paket yang tercantum dalam SIRUP dengan nilai pagu tertinggi yang telah selesai tender, tender gagal atau tender ulang Tahun 2024
b	Nama Paket dan Pagu Nilai Paket tertinggi			PPID memberikan tangkapan layar dan alamat link LPSE yang menunjukkan nama paket yang tercantum dalam SIRUP dengan nilai pagu tertinggi yang telah selesai tender, tender gagal atau tender ulang Tahun 2024
II	**MENGUMUMKAN INFORMASI TAHAP PEMILIHAN** (Hanya dokumen yang relevan atau sesuai persyaratan dengan Paket Pengadaan Barang dan Jasa baik metode lelang/nonlelang selain e-purchasing. Bila paket pekerjaan tidak mensyaratkan hal tertentu, PPID menuliskan "TIDAK RELEVAN/TIDAK DIPERSYARATKAN")			
	Kementerian/Lembaga/Badan menguasai dan mengumumkan dokumen pengadaan jasa dan barang 2 paket tertinggi yang telah selesai pemilihan atau selesai lelang Tahun 2024 dan memuat informasi tentang:			Paket pekerjaan dapat berbeda atau sama dengan pertanyaan I.3 sejauh tercantum dalam SIRUP
a	Paket 1 (sebutkan nama paket)			PPID menyebutkan nama paket disertai nilai pagu dari paket yang telah selesai tender
b	Paket 2 (sebutkan nama paket)			PPID menyebutkan nama paket disertai nilai pagu dari paket yang telah selesai tender

BARANG DAN JASA

1	Kerangka Acuan Kerja (KAK);			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan dalam point II a dan b
2	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan dalam point II a dan b
3	Spesifikasi Teknis;			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan dalam point II a dan b
4	Rancangan Kontrak;			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan dalam point II a dan b
5	Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan dalam point II a dan b
6	Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan dalam point II a dan b
7	Daftar Kuantitas dan Harga;			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan dalam point II a dan b
8	Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan dalam point II a dan b

BEBERAPA CONTOH PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK

INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

Tahap Perencanaan- Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang & Jasa

Memuat rencana umum pengadaan barang dan jasa baik dengan metode tender atau metode lain yang dilakukan oleh biro APBJ maupun yang akan dilakukan oleh pokja/panitia pengadaan barang jasa RSUD Prof Dr margono Soekarjo tahun 2024

Jumlah Paket pengadaan barang jasa dengan metode s.d April 2024 :

- Pengadaan langsung : 42 Paket senilai Rp.5.182.996.545
- e-Purchasing: 81 paket pengadaan senilai Rp.194.684.971.000
- Dikecualikan : 84 paket pengadaan senilai Rp. 78.748.640.255
- Seleksi: 1 paket pengadaan senilai Rp.650.000.000
- Tender : 1 paket pengadaan senilai Rp. 878.903.200
- Swakelola : 10 paket pengadaan senilai Rp. 169.289.940.000

Penanggungjawab Pembuatan Informasi	: Unit Layanan Pengadaan
Waktu Pembuatan / Penerbitan Informasi	: Update data tahun 2024 / RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Bentuk Informasi Yang Tersedia	: Hard & Soft (file_pdf)
Jangka Waktu Penyimpanan	: selama masih berlaku
Jenis Media Yang Memuat Informasi	: Dokumen RUP

Open data:

https://rsmargono.jatengprov.go.id/rsms-opendata/datasheet/index/?q=rencana%20umum%20pengadaan

BARANG DAN JASA

9	Gambar Rancangan Pekerjaan;			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan dalam point II a dan b
10	Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan dalam point II a dan b
11	Dokumen Penawaran Administratif;			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan dalam point II a dan b
12	Surat Penawaran Penyedia;			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan dalam point II a dan b
13	Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan dalam point II a dan b
14	Berita Acara Pemberian Penjelasan;			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan dalam point II a dan b
15	Berita Acara Pengumuman Negosiasi;			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan dalam point II a dan b
16	Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan dalam point II a dan b
17	Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan dalam point II a dan b

BARANG DAN JASA

18	Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan dalam point II a dan b
19	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan dalam point II a dan b
III	**MENGUMUMKAN TAHAP PELAKSANAAN** ((Hanya dokumen yang relevan atau sesuai persyaratan dengan Paket Pengadaan Barang dan Jasa baik metode lelang/nonlelang selain e-purchasing. Bila paket pekerjaan tidak mensyaratkan hal tertentu, PPID menuliskan "TIDAK RELEVAN/TIDAK DIPERSYARATKAN")			
	Kementerian/Lembaga/Badan menguasai dan mengumumkan dokumen pengadaan jasa dan barang 2 paket tertinggi yang telah selesai pelaksanaan atau serah terima pekerjaan Tahun 2024 dan memuat informasi tentang:			Paket pekerjaan dapat berbeda atau sama dengan pertanyaan I.3 dan II sejauh tercantum dalam SIRUP
a	Paket 1 (sebutkan nama paket)			PPID menyebutkan nama paket disertai nilai pagu dari paket yang telah selesai tender
b	Paket 2 (sebutkan nama paket)			PPID menyebutkan nama paket disertai nilai pagu dari paket yang telah selesai tender
1	Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan
2	Ringkasan Kontrak yang sekurang□kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan

BARANG DAN JASA

3	Surat Perintah Mulai Kerja			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan
4	Surat Jaminan Pelaksanaan			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan
5	Surat Jaminan Uang Muka			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan
6	Surat Jaminan Pemeliharaan			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan
7	Surat Tagihan			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan
8	Surat Perintah Membayar			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan
9	Surat Perintah Pencairan Dana			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan
10	Laporan Pelaksanaan Pekerjaan			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan
11	Laporan Penyelesaian Pekerjaan			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan
12	Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan

KELEMBAGAAN

Monev
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

NO	PERTANYAAN	TERSEDIA		BUKTI PELAKSANAAN
		Ya	Tidak	
I	**Legalitas**			
1	SK Penetapan PPID yang telah diperbaharui			PPID memberikan dokumen penetapan PPID, baik dalam bentuk pdf, informasi elektronik dan bentuk lainnya
II	**Kepemimpinan**			
1	Menetapkan arah kebijakan pelayanan informasi publik			PPID memperlihatkan bukti yang memuat arah kebijakan pelayanan informasi publik yang ditetapkan oleh Atasan PPID
2	Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.			PPID memperlihatkan dokumen dan atau bukti lain yang menunjukkan kinerja atau kegiatan oleh PPID dalam pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan informasi publik
3	Melakukan pembinaan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana dalam bentuk:			
a	Penilaian Monitoring dan Evaluasi terhadap PPID Pelaksana			PPID memperlihatkan foto dan hasil kegiatan monev internal terhadap PPID Pelaksana
b	Bimbingan Teknis/Pelatihan-pelatihan kepada pengelola PPID			PPID memperlihatkan foto dan hasil kegiatan terkait bimtek/pelatihan atas sejenisnya yang melibatkan PPID Pelaksana
c	Konsolidasi pelaporan pelayanan informasi PPID Pelaksana kepada PPID			PPID memperlihatkan dokumen berkaitan konsolidasi pelaporan yang melibatkan PPID Pelaksana
d	Kegiatan-kegiatan lain berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan			PPID memperlihatkan dokumen atau foto-foto kegiatan yang melibatkan PPID Pelaksana
III	**Institusionalisasi PPID**			
1	Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik			PPID memberikan bukti foto, surat menyurat atau bentuk lain berkaitan dengan koordinasi dalam penyimpanan,pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik

KELEMBAGAAN

2	Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi			PPID memberikan bukti foto, surat menyurat atau bentuk lain berkaitan dengan koordinasi dalam pengumpulan bahan informasi publik dari PPID Pelaksana
3	Menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan mengelola Informasi untuk memelihara, membuat, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik			PPID memberikan bukti foto, surat menyurat atau bentuk lain berkaitan dengan penyusunan Daftar Informasi Publik
IV	**Dukungan anggaran rutin ke-PPID an**			
1	Menyediakan anggaran rapat-rapat			PPID memperlihatkan dokumen resmi yang memuat nomenklatur anggaran kegiatan keterbukaan informasi yang dilaksanakan oleh PPID
2	Menyediakan anggaran untuk peningkatan kapasitas PPID (bimtek dan sejenisnya)			PPID memperlihatkan dokumen resmi yang memuat nomenklatur anggaran untuk peningkatan kapasitas PPID
3	Menyediakan anggaran pengembangan fasilitas layanan informasi publik			PPID memperlihatkan dokumen resmi yang memuat nomenklatur anggaran kegiatan untuk pelaksanaan layanan informasi publik
4	Meja dan Ruang Layanan Informasi			PPID memperlihatkan foto
5	Fasilitasi layanan informasi bagi Penyandang Disabilitas			PPID memperlihatkan foto
V	Kementerian/Lembaga/Badanmenyediakan Informasi Dikecualikan hasil Uji Konsekuensi terakhir sesuai standar Perki 1 Tahun 2021			Dokumen SK Penetapan DIK Tahun Terakhir yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang

Monev
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

terimakasih

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, SEKRETARIAT UTAMA,
BIRO FASILITASI PIMPINAN, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN ADMINISTRASI

Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik

"Operational Sharing"

PPID Universitas Negeri Malang

A.N. Afandi

Monitoring, Evaluasi, dan Pemenuhan Evidence Penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Golden Tulip Hotel, Batu, Jawa Timur, Indonesia
Rabu, 17 September 2025

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Regulasi

- *UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.*
- *UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.*
- *UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan*
- *Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*

PPID *>> Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh Badan Publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.*

Perubahan Era

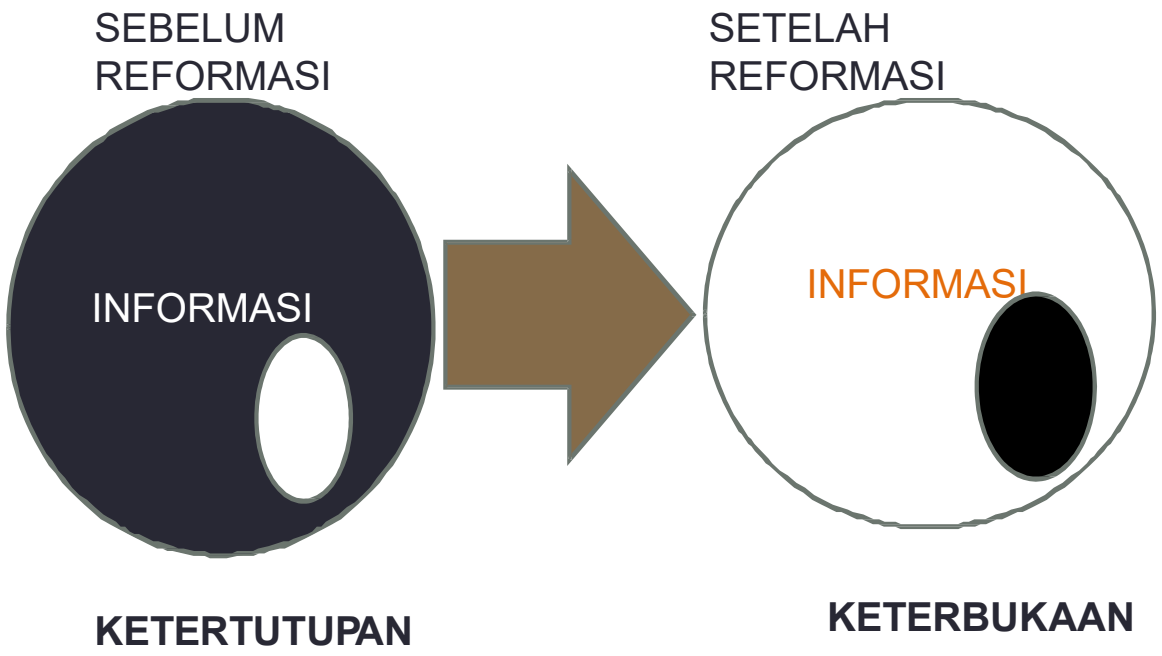

- Pendokumentasian
- Penyimpanan
- Penyediaan
- Pelayanan Informasi

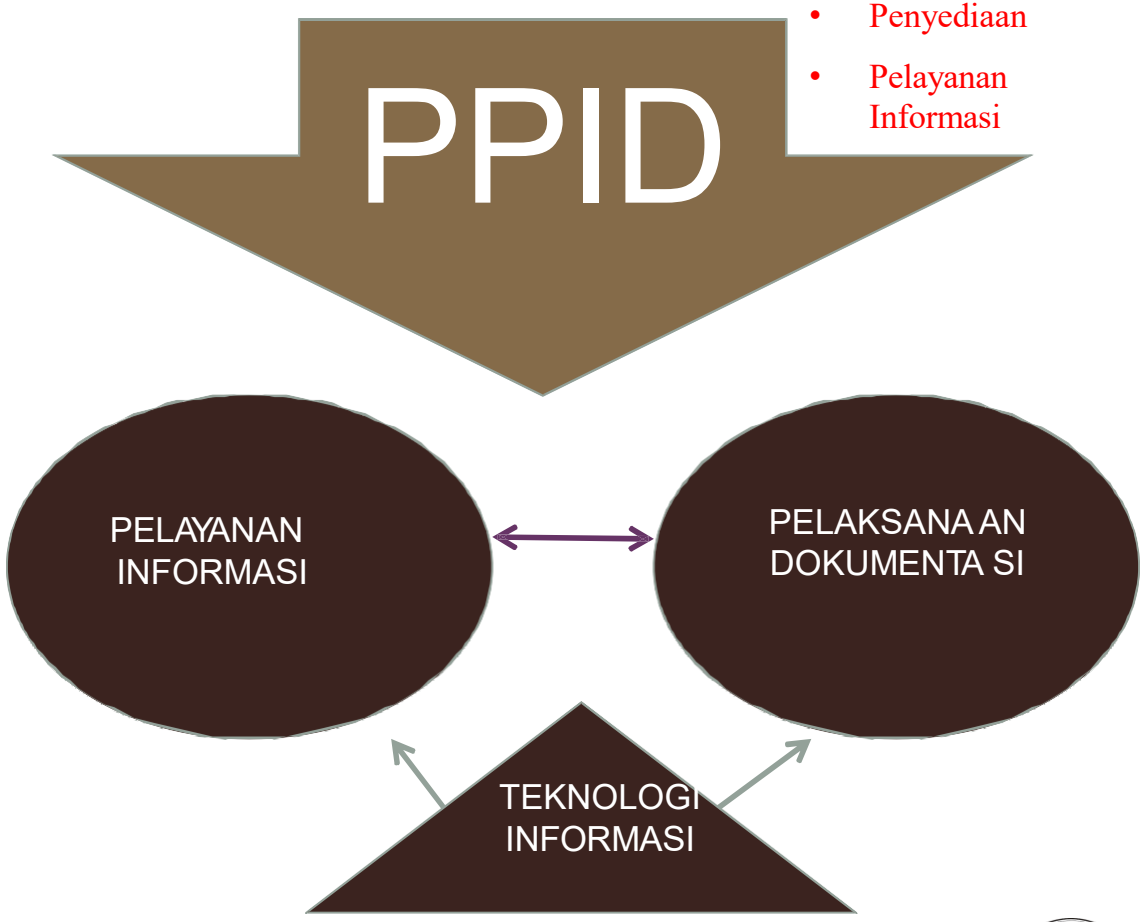

Informasi Wajib/Diumumkan Berkala

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA
1. Informasi tentang profil Badan Publik 1. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit dibawahnya; 2. Struktur Organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural; 3. Laporan harta kekayaan bagi pejabat negara yang telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan.
2. Ringkasan informasi tentang **program dan/atau kegiatan** yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik ;
3. Ringkasan informasi tentang **kinerja dalam lingkup Badan Publik;**
4. Ringkasan laporan keuangan; ❑ Rencana dan L R A ❑ Neraca ❑ Laporan Arus Kas dan C A L K ❑ Daftar Aset dan Investasi

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA (LANJUTAN)
5. Ringkasan **laporan akses Informasi Publik;**
6. Informasi tentang **peraturan, keputusan**, dan/atau kebijakan;
7. Informasi tentang **hak dan tata cara** memperoleh Informasi Publik;
8. informasi tentang **tata cara pengaduan** penyalahgunaan wewenang;
9. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa;
10. Informasi tentang prosedur **peringatan dini dan prosedur** evakuasi keadaan darurat.

Informasi Dikecualikan

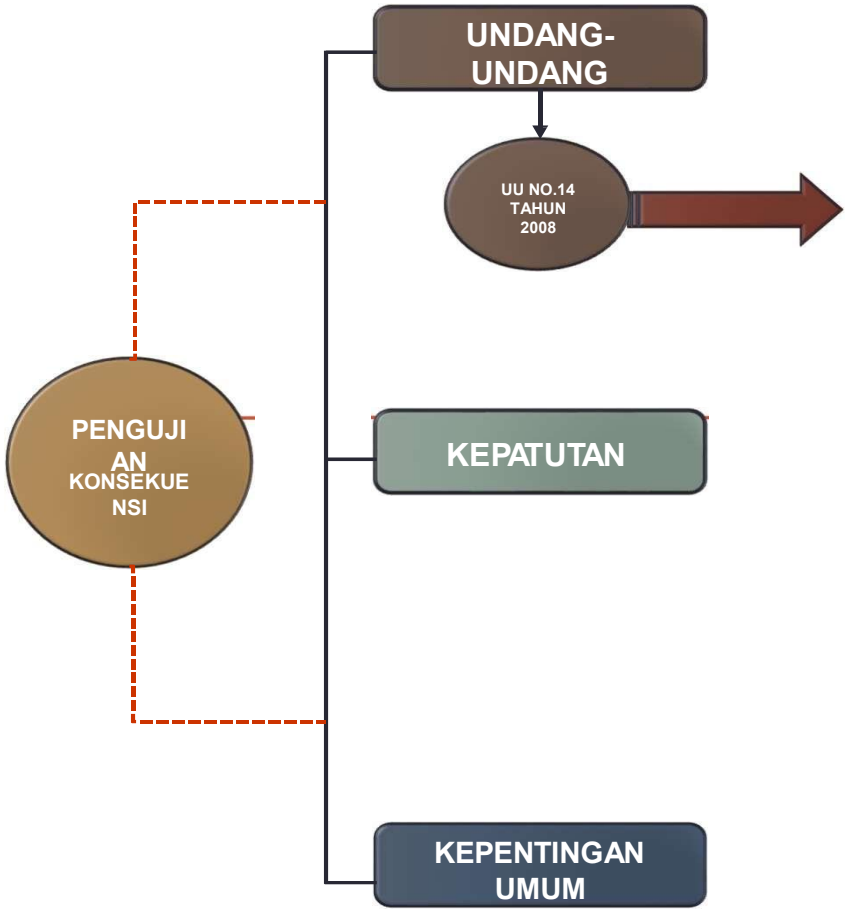

a. Dapat Menghambat Proses Penegakan Hukum;

b. Dapat Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

c. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;

d. Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;

e. Dapat Merugikan ketahanan ekonomi nasional;

f. Dapat Mengungkapkan merugikan kepentingan hubungan luar negeri;

g. Dapat Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;

h. Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi;

i. Memorandum Atau Surat-Surat Antar Badan Publik Atau Intra Badan Publik, Yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan Kecuali Atas Putusan Komisi Informasi Atau Pengadilan;

j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Badan Publik

Badan Publik adalah:

- Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara.
- Organisasi non-pemerintah yang sebagian atau seluruh anggarannya bersumber dari APBN atau APBD.
- Lembaga yang mendapatkan hibah dari APBN/APBD atau sumbangan masyarakat.
- Badan atau organisasi lain yang melaksanakan fungsi publik atau organisasi swasta yang menerima dana dari anggaran negara.

- Mengakses informasi publik.
- Menyebarluaskan informasi publik.
- Meminta informasi tanpa alasan.

Badan Publik

Masyarakat

Predikat Informatif

37,7 %

Predikat Menuju Informatif dan **Predikat Cukup Informatif**

15,2%

Predikat Kurang Informatif dan **Predikat Tidak informatif**

47,1%

Golden Tulip Hotel, Batu, Jatim
Rabu, 17 September 2025

Golden Tulip Hotel, Batu, Jatim
Rabu, 17 September 2025

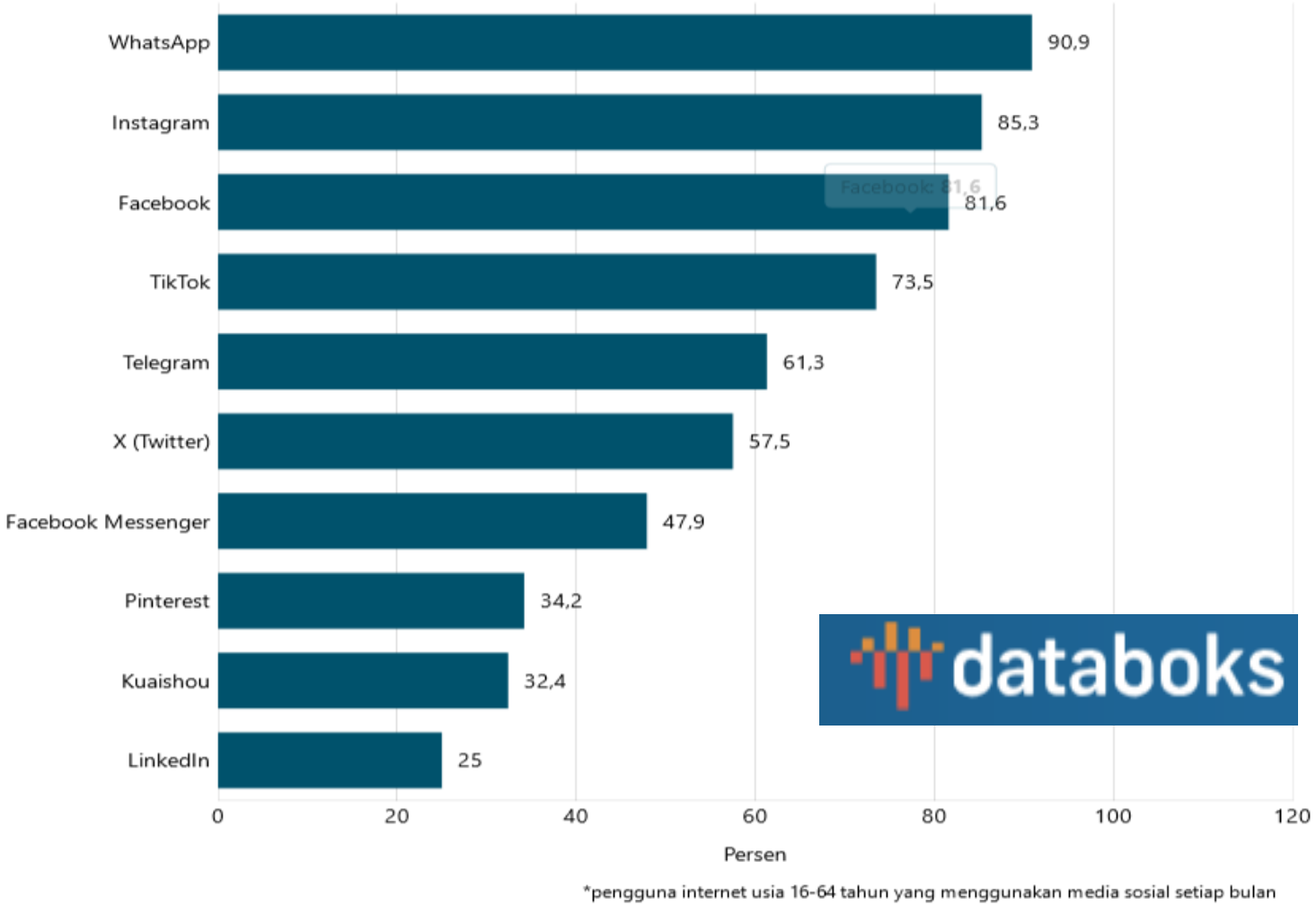

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Wewujudkan Ketersediaan Informasi

Definisi Keterbukaan Informasi Publik

- **Keterbukaan Informasi Publik** berarti memberikan hak kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dari badan publik, serta kewajiban bagi badan publik untuk menyediakan informasi tersebut secara transparan dan bertanggung jawab.
- **Informasi publik** ini mencakup segala hal yang berkaitan dengan kepentingan publik yang dikuasai oleh badan publik dan seharusnya diketahui oleh masyarakat.

Tujuan Keterbukaan Informasi Publik

- **Meningkatkan Transparansi**: Membuka akses informasi yang relevan agar masyarakat dapat memahami kebijakan, program, dan kinerja badan publik.
- **Memperkuat Akuntabilitas**: Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengawasi, mengevaluasi, dan memberi masukan terhadap kebijakan dan kinerja badan publik.
- **Mendorong Partisipasi Publik**: Memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan publik.
- **Menjamin Hak Masyarakat**: Memberikan hak kepada masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh informasi publik yang berdampak pada kehidupan mereka.

Informasi Publik yang Harus Dibuka

- **Informasi Berkala**: Informasi yang wajib diumumkan secara teratur, seperti laporan keuangan, kinerja, program, dan anggaran badan publik.
- **Informasi Serta Merta**: Informasi yang harus diumumkan segera, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak atau keadaan darurat.
- **Informasi yang Tersedia Setiap Saat**: Informasi yang harus selalu tersedia dan dapat diakses oleh publik kapan saja, seperti keputusan, kebijakan, dan peraturan badan publik.

Informasi yang Dikecualikan

- Informasi yang membahayakan keamanan negara.
- Informasi yang berkaitan dengan hak privasi individu.
- Informasi yang dapat mengganggu proses penegakan hukum.

Keterbukaan Informasi Publik

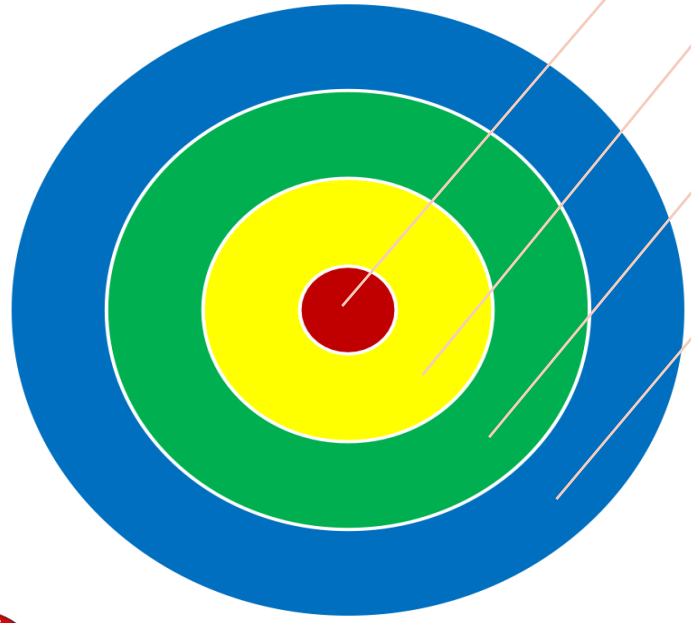

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional

Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik

Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yg berkualitas.

Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif & efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi
Universitas Negeri Malang

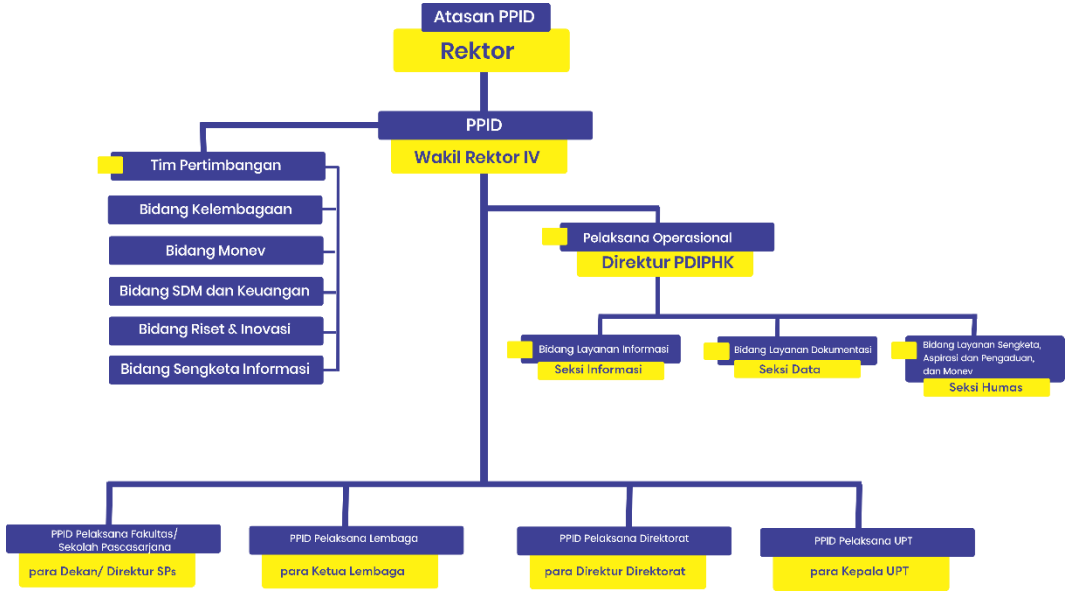

- Dibentuk 4 Januari 2016 melalui SK Rektor
- Struktur organisasi melibatkan PPID Pelaksana fakultas, lembaga, UPT

Grand Desain: sistem layanan informasi terintegrasi, responsif, adaptif

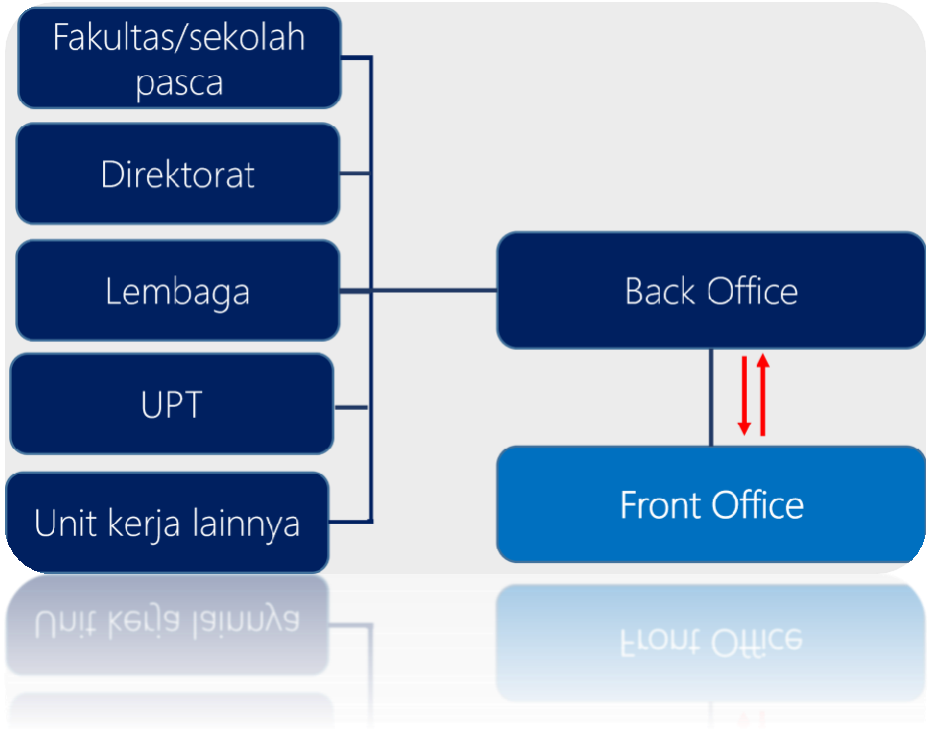

History PPID UM

Golden Tulip Hotel, Batu, Jatim
Rabu, 17 September 2025

Peringkat 7 (tujuh)
Tahun 2016

Peringkat 4
Tahun 2017

kategori menuju
informatif tahun
2018-2019

Informatif tahun
2020–2024

Pamuncak 2022-2024

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Kebijakan Layanan Informasi

1 Rencana Aksi di Rencana Induk Pengembangan UM 2022-2041

Smart digital university

- ❑ Artificial intelligence
- ❑ Internet of things (IoT),
- ❑ Machine learning,
- ❑ Blockchain,
- ❑ Big data,
- ❑ Automation,
- ❑ Immersive media,
- ❑ Mobile technologies, dan
- ❑ Cloud computing.

2

Rencana Aksi di Renstra UM 2022-2026

Utilisasi sistem informasi yang integratif berbasis AI untuk mewujudkan tata kelola UM yang modern, efektif, efisien, akuntabel, dan dinamis

Data dan Informasi

Data → Informasi → Pengetahuan

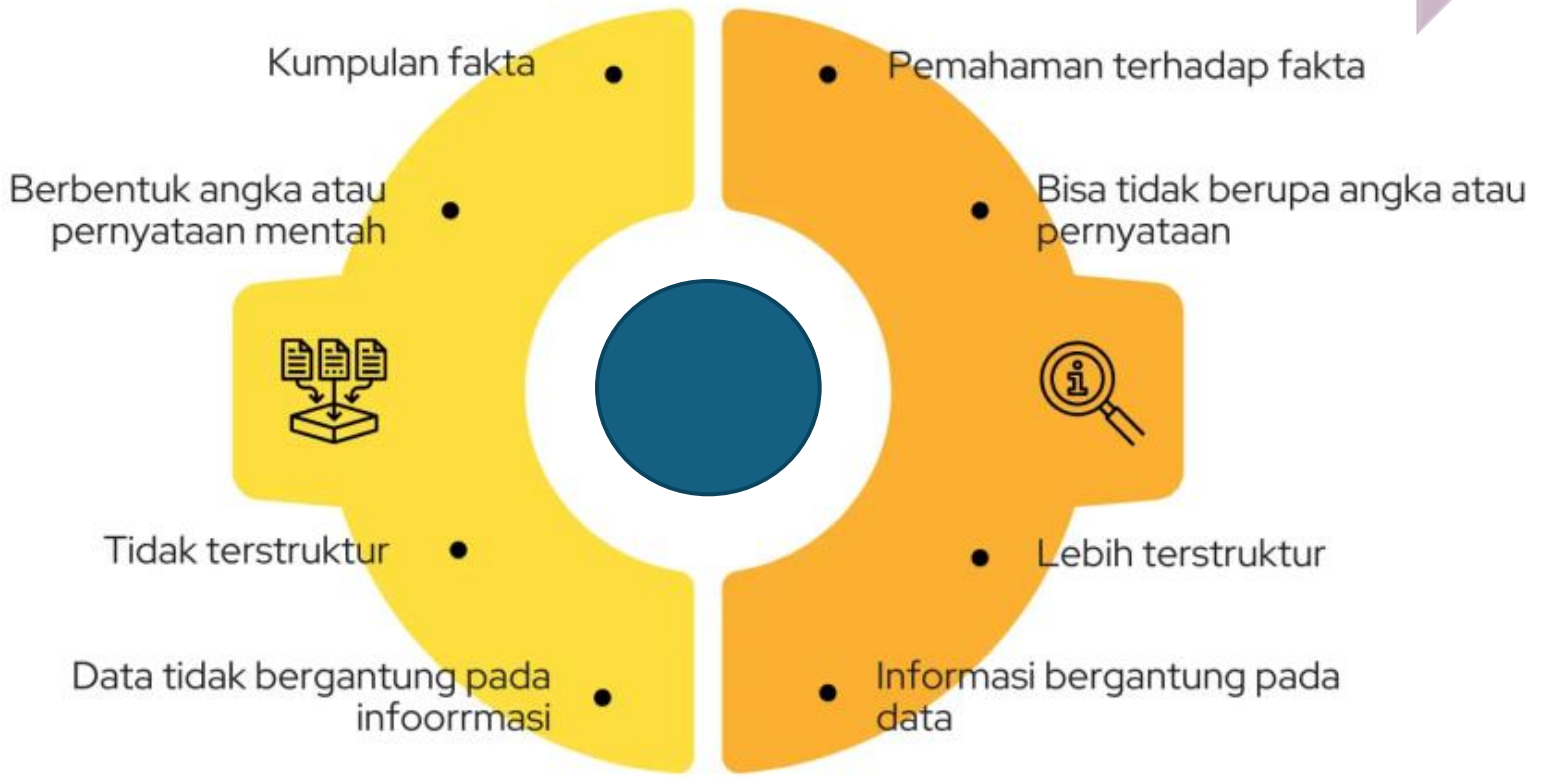

Inovasi Layanan

Golden Tulip Hotel, Batu, Jatim
Rabu, 17 September 2025

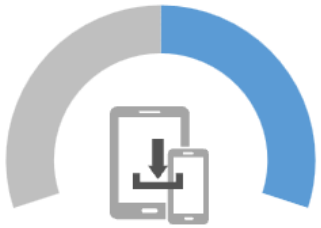

2020

Revitalisasi Laman dan Layanan Android

2021

Digitalisasi

- **E-DIP**
- **Laporan PPID (diakses secara online)**

2022

Inklusifitas layanan

- ❑ ***SIMBK***
- ❑ **Buku Pegangan (Bacaan) Pendidikan Inklusif untuk guru dan orang tua berjudul "Nuraga Sang Guru"**

2023

Implementasi

- ❑ **Produk Rumah Inovasi Belajar**
- ❑ **Internship sebagai Kader Keterbukaan Informasi**

Inklusifitas

2024

2025

Manajemen

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Sumber Daya Manusia

Golden Tulip Hotel, Batu, Jatim
Rabu, 17 September 2025

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Strategi Publikasi

Golden Tulip Hotel, Batu, Jatim
Rabu, 17 September 2025

Konferensi Pers
19 Kegiatan

Agenda
65 Kegiatan

Rilis
66 Kegiatan

Pengumuman
20 Kegiatan

Warta
10 Edisi

Majalah Swara Pendidikan
2 Edisi

Website um.ac.id
Berita 392 unggahan

Kunjungan SMA

- 45 Sekolah
- 8.140 siswa

Edu Expo
2 Kegiatan

❑ Gathering & Hearing Media

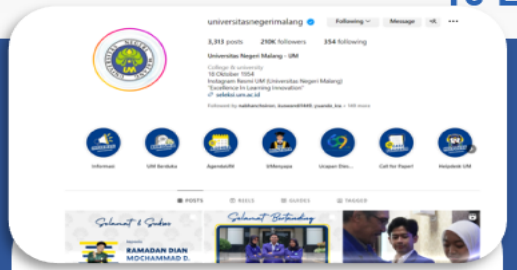

- 113 Unggahan
- 214 Unggahan
- 314 Unggahan
- 98 Unggahan
- 62 Unggahan

Kerjasama dengan Media

Malang Post : 44 berita
Radarmalang.Jawapost.com : 89 berita
Surya Malang : 41 berita
Seru.co.id : 21 berita
Detik.com : 24 berita
Kompas.com : 10 berita
Times Indonesia: 10 berita

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Mendorong Partisipasi

Golden Tulip Hotel, Batu, Jatim
Rabu, 17 September 2025

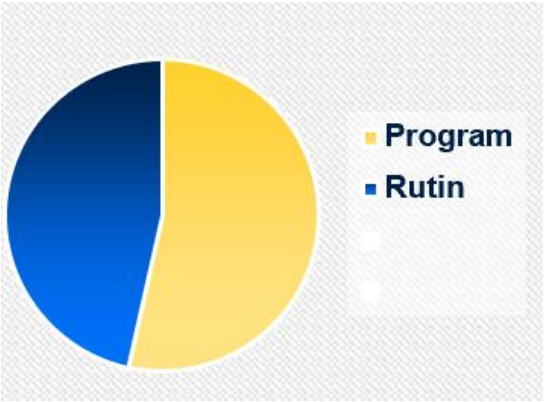

LHKPN ditampilkan pada Profil Pimpinan

Pengadaan Barang dan Jasa

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Diakses orangtua mahasiswa

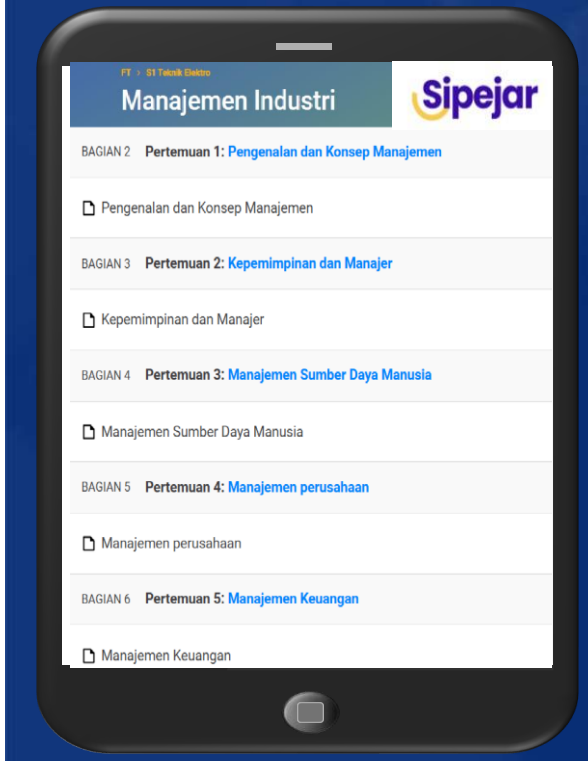

Fitur

- ✓ Dosen pengajar
- ✓ Mata kuliah
- ✓ Waktu ujian

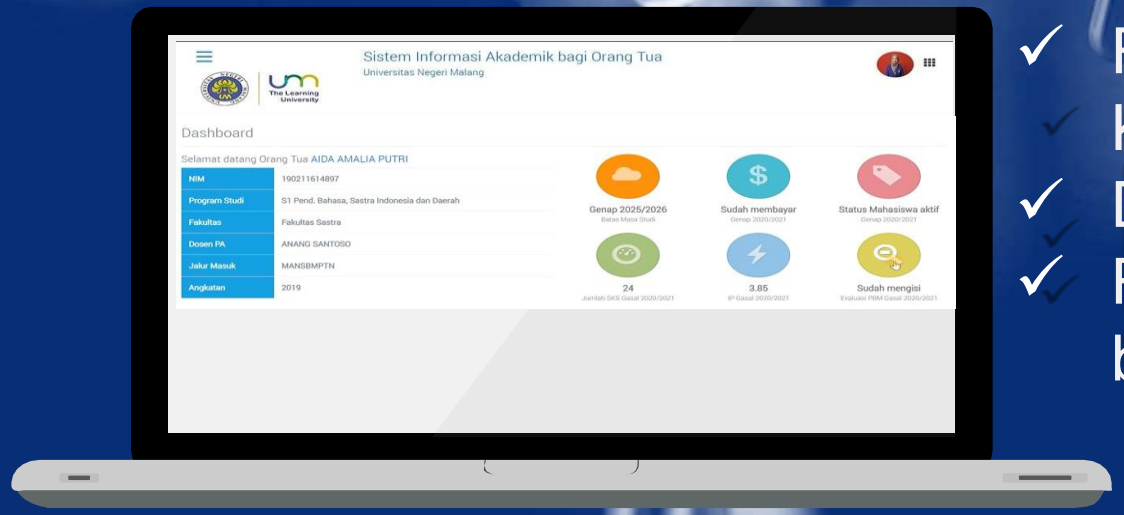

Fitur

- ✓ Riwayat Keuangan
- ✓ Daftar hasil studi
- ✓ Riwayat bimbingan

Membangun Budaya Transparansi

Golden Tulip Hotel, Batu, Jatim
Jumat, 17 September 2025

❑ Duta Keterbukaan Informasi Publi

Kegiatan sosialisasi kepada para Sivitas UM tentang Pentingnya penyampaian informasi publik melalui saluran yang tepat.

❑ Coffee Morning

❑ Launching Griya Moderasi Beragama

❑ Penetapan Satgas PPKS

Inklusifitas

Sosial-Ekonomi-Disabilitas

- ❑ Mahasiswa Disabilitas
- ❑ Mahasiswa Daerah
- ❑ Afirmasi
- ❑ Prestasi
- ❑ KIP-K
- ❑ Beasiswa
- ❑ Penerimaan Nasional
- ❑ Penerimaan Internasional
- ❑ Sebaran Provinsi
- ❑ Distribusi Kota/Kabupaten
- ❑ Dan lainnya

UM Transcription Talk

LIVE: Wisuda Periode ke-129 Universitas Negeri Malang (UM) | 27 Oktober 2024 - 08.00 WIB

Juru Bahasa Isyarat

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Integrasi Sistem Informasi

Excellence in Learning Innovation

Sistem layanan berbasis Aplikasi

Terbuka akses publik

11

- Penerimaan Mahasiswa Baru
- Layanan Barang dan Jasa
- Pakar
- Sistem Kerjasama
- Rumah Inovasi
- Sistem Informasi Perpustakaan
- Statistik UM
- Survei
- Tutorial
- E-PPID

Support untuk aplikasi

Vocalizer suara

Envision
Envision Technologies BV
Pembelian dalam apl

Envision AI

SIS [System integration services]

FIP FT FIK
FS FEB FIS
FMIPA VOKASI FPsi
SPs

m/

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Layanan Informasi Publik

Golden Tulip Hotel, Batu, Jatim
Rabu, 17 September 2025

SIPEJAR UM | RUMAH INOVASI | SIMBK P3MBK | MODUL SPEED Special Education | BK - ONLINE P2BK3A | KEPAKARAN

PENDIDIKAN & PENGAJARAN

PENELITIAN & PENGEMBANGAN

PUBLIKA Pusat Publikasi Akademik Universitas Negeri Malang

SENTRA HKI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

UM The Learning University — LITABMAS
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

1. LAYANAN INFORMASI
2. MENELITI
3. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1.391

27 Provinsi

112 Kota/Kabupaten

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Kapal penabur pakan ikan

Program-program kewirausahaan

PENGEMBANGAN DESA WISATA

DOSEN MENGABDI DIDANAI UM

756

12 Provinsi

60 Kota/Kabupaten

Laporan Online

Laporan Layanan permohonan Informasi Publik

Laporan Layanan Aspirasi dan Pengaduan

HalloUM

Unit Layanan Terpadu

Transformasi layanan

1. **Layanan Konvensional**

   Mengandalkan tatap muka dan proses manual, seperti pendaftaran, pengambilan data, dan pengajuan permohonan.

2. **Layanan Online**

   Pemanfaatan platform digital, seperti website, aplikasi aplikasi mobile, dan sistem online, untuk mempermudah mempermudah akses dan proses layanan.

3. **Integrasi Layanan**

   Penggabungan berbagai layanan online dan offline, memberikan pengalaman pengguna yang lebih optimal. optimal.

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

https://ppid.um.ac.id/

Golden Tulip Hotel, Batu, Jatim
Rabu, 17 September 2025

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

@universitasnegerimalang | Universitas Negeri Malang - UM | UniversitasNegeriMalangOfficial | @universitasnegerimalang | @um.ac.id | www.um.ac.id | @UM_1954

Golden Tulip Hotel, Batu, Jatim
Rabu, 17 September 2025

Ayooo…Menjadi Badan Publik
INFORMATIF

A.N. Afandi
an.afandi@um.ac.id

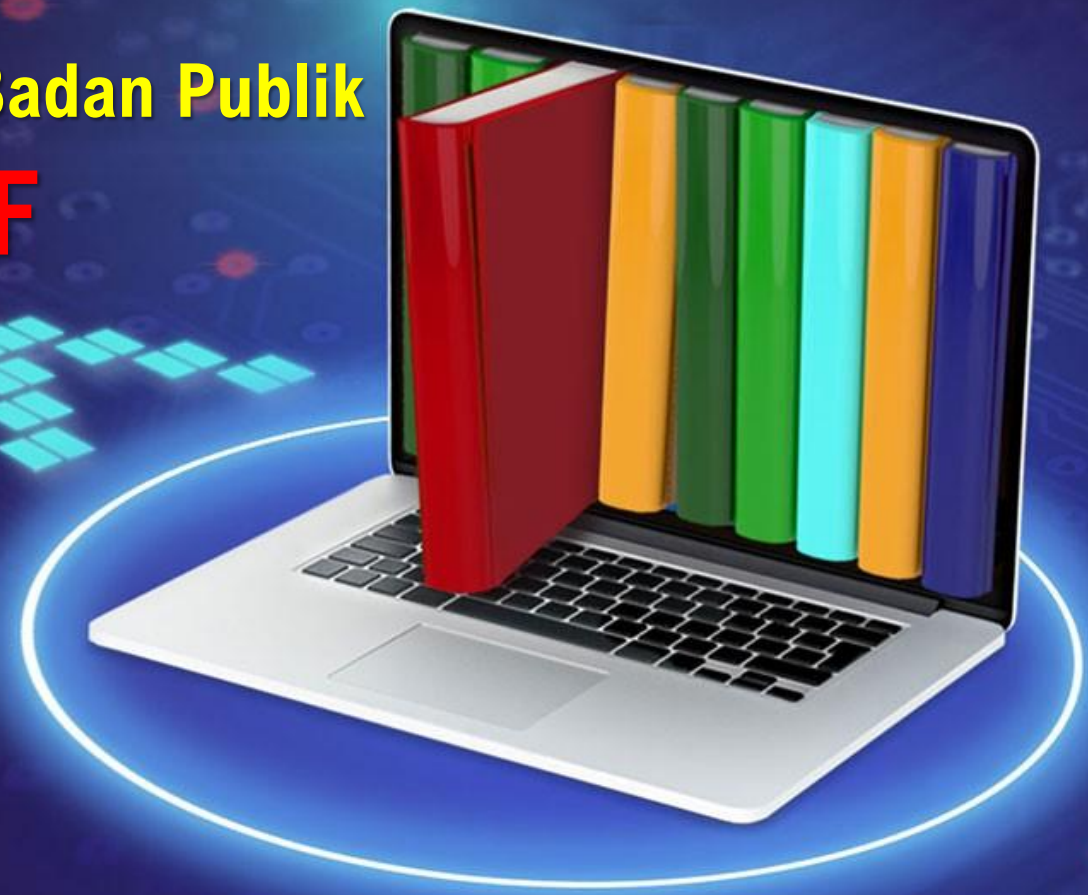

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DOKUMENTASI KEGIATAN BIMTEK

BIMTEK PPID DI BANDUNG

BIMTEK PPID MALANG